



**DETERMINAN TERJADINYA KECENDERUNGAN
KECURANGAN AKUNTANSI OLEH PEGAWAI
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Sania Anggita Endah Kumara

NIM 7211414182



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING .

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Drs. Fachrurroziq, M.Si.

NIP. 196206231989011001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prabowo', is written over the text 'Pembimbing'.

Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.S.A.

NIP. 198205072008121005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

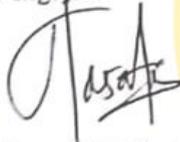
Hari : Selasa
Tanggal : 23 Oktober 2018

Penguji I



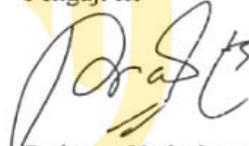
Drs. Asrori M.S
NIP. 196005051986011001

Penguji II



Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.
NIP. 198112222014041001

Penguji III



Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA
NIP. 198205072008121005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Anggita Endah Kumara
NIM : 7211414182
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 23 April 1996
Alamat : Jl. Masjid Gg. Kerja IV RT.002 RW.003 Kelurahan
Ngilir Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2018



Sania Anggita Endah Kumara
NIM 7211414182

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung. –QS. Ali Imran: 173

Allah tak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang terbaik dan tidak melambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik untuk manusia itu pula.

Segala sesuatu yang baik; selalu datang di saat terbaiknya. Persis waktunya. Tidak datang lebih cepat, pun tidak lebih lambat. Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai keyakinan. –Tere Liye

Persembahan

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Orang tuaku, Dosenku dan Almamaterku serta sahabat yang telah menerima apa adanya, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu hadir bukan hanya pada suka maupun pada duka dan luka, selalu memberikan semangat, saran, nasehat dan doa-doa hebat serta perkataan-perkataan positif yang membangkitkan semangat.

Semoga Allah Ta'ala selalu membalas kebaikan-kebaikan kalian.

PRAKATA

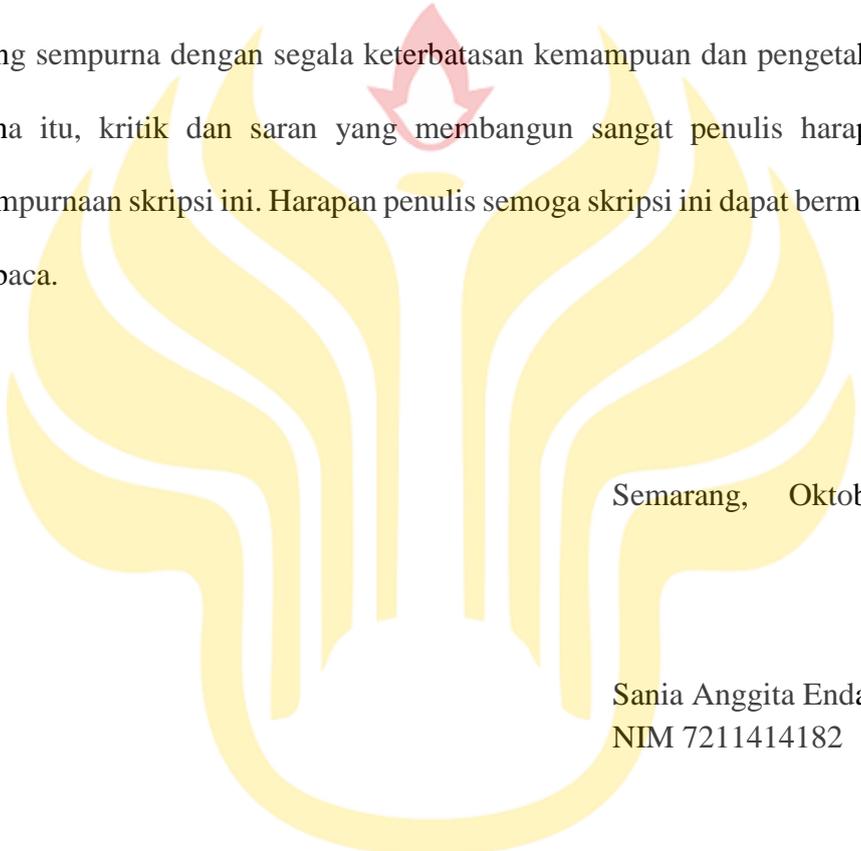
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Determinan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Kota Semarang. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Prabowo Yudo Jayanto, S.E, M.SA., selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar senantiasa memberikan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Drs. Asrori MS., selaku Dosen penguji I skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si., selaku Dosen penguji II skripsi yang memberikan kritik dan sarannya untuk skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang khususnya dosen Akuntansi, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
8. Seluruh pegawai koperasi syariah yang terhimpun PBMTI, KSPPS At-Taqwa, KSPPS Binama, KSPPS Damar, KSPPS Fosilatama, KSPPS Hudatama, KSPPS Mitra Anda, KSPPS Walisongo, KSPPS El-Labana, KSPPS Bondho Tumoto, KSPPS Ki Ageng Pandanaran dan KSPPS El Gama yang telah membantu dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Kedua orangtua yang selalu memberikan doa dan semangat peneliti untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan firdaus-Nya.
10. Saudara dan keluarga besar yang selalu setia memberikan saran, semangat dan dukungannya.
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Akutansi A 2014 yang selalu setia menemani, membantu, memotivasi dan memberi masukan serta memberi semangat.
12. Teman-teman bimbingan Bapak Prabowo Yudo Jayanto, S.E, M.SA, yang selalu setia mengingatkan, dan saling membantu serta menasehati peneliti dalam melakukan penulisan tugas akhir ini.

13. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga bantuan, pengorbanan dan amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.



Semarang, Oktober 2018

Sania Anggita Endah Kumara
NIM 7211414182

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Kumara, Sania Anggita Endah. 2018. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang. Sarjana Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA. Hal. 209

Kata kunci: **Kesesuaian; Konflik; Efektivitas; Asimetri; Etika; Religiusitas; Kecenderungan; Kecurangan.**

Munculnya banyak kasus mengenai kecurangan akuntansi pada lembaga keuangan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan beralih ke lembaga keuangan seperti koperasi syariah. Namun, ditengah perkembangannya, koperasi syariah dihadapkan banyak permasalahan seperti kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal koperasi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, *conflict of interest*, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, etika bisnis Islam, dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini menggunakan Teori *Fraud Triangle*, dan Teori Al-Wala. Populasi dalam penelitian ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang dengan perolahan data melalui pegawai koperasi. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, pada kriteria Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terdaftar di Perhimpunan BMT Indonesia Kota Semarang yaitu sebanyak 11 koperasi dengan 65 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan alat analisis SmartPLS 3.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi dan efektivitas pengendalian internal tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai, *conflict of interest* dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai. Sedangkan variabel etika bisnis Islam dan religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memprediksi kemungkinan kecurangan oleh pegawai, terutama dalam seleksi penerimaan, perlu adanya proses *screening* yang jelas dan perlu evaluasi kerja yang teratur dalam koperasi. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk menambahkan variable baru seperti GCG (*Good Corporate Governance*), menambahkan metode wawancara, dan memperbesar jumlah responden atau sample penelitian agar lebih representatif.

ABSTRACT

Kumara, SaniaAnggitaEndah. 2018. Determination of the occurrence of Accounting Fraud Trends by Employees in Savings and Credit Cooperatives and Islamic Financing in Semarang City. Bachelor of Economics. Semarang State University. Advisors PrabowoYudo Jayanto, S.E., M.SA. Page. 209

Keywords:*Suitability; Conflict; Effectiveness; Asymmetry; Ethics; Religiosity; Tendency; Fraud.*

The emergence of many cases of accounting fraud in financial institutions has caused people to lose trust and turn to financial institutions such as Islamic cooperatives. However, in the midst of its development, Islamic cooperatives faced many problems such as fraudulent tendencies carried out by internal cooperatives themselves. This study aims to examine the effect of suitability of compensation, conflict of interest, effectiveness of internal control, information asymmetry, Islamic business ethics, and religiosity on accounting fraud tendencies.

This study uses the Fraud Triangle Theory, and Al-Wala Theory. The population in this study is Savings and Credit Cooperatives and Islamic Financing in the City of Semarang by processing data through cooperative employees. The sampling technique using purposive sampling method, on the criteria of Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing registered at the Indonesian BMT Association in Semarang City as many as 11 cooperatives with 65 respondents. Data collection is done by questionnaire method. Analysis data method used is Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) with a SmartPLS 3.0 analysis tool.

The results showed that compensation compensation variables and the effectiveness of internal controls did not have a negative influence on the tendency of employee accounting fraud, conflict of interest and information asymmetry had a positive effect on the tendency of accounting fraud by employees. While the variables of Islamic business ethics and religiosity negatively affect the tendency of accounting fraud.

This research is expected to be a reference for predicting the possibility of fraud by employees, especially in the selection of admissions, it is necessary to have a clear screening process and need to evaluate regular work in cooperatives. Suggestions for future researchers are to add new variables such as GCG (Good Corporate Governance), add interview methods, and increase the number of respondents or research samples to be more representative.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	20
1.3. Cakupan Masalah	21
1.4. Rumusan Masalah	22
1.5. Tujuan Penelitian	22
1.6. Kegunaan Penelitian	23
1.7. Orisinilitas Penelitian	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
2.1. Kajian Teori Utama	26
2.1.1. <i>Fraud Triangle Theory</i>	26
2.1.2. Teori Al-Wala'	30
2.2. Kajian Variabel Penelitian	32
2.2.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	32
2.2.2. Kesesuaian Kompensasi	40
2.2.3. <i>Conflict of Interest</i>	43
2.2.4. Efektivitas Pengendalian Internal	46
2.2.5. Asimetri Informasi	50

2.2.6. Etika Bisnis Islam	53
2.2.7. Religiusitas.....	60
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu	64
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	71
2.4.1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	72
2.4.2. Pengaruh <i>Conflict of Interest</i> terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	73
2.4.3. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	75
2.4.4. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	76
2.4.5. Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	78
2.4.6. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	79
BAB III METODE PENELITIAN	82
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	82
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	82
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	85
3.3.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>)	85
3.3.2. Kesesuaian Kompensasi	86
3.3.3. <i>Conflict of Interest</i>	86
3.3.4. Efektivitas Pengendalian Internal	87
3.3.5. Asimetri Informasi	88
3.3.6. Etika Bisnis Islam	89
3.3.7. Religiusitas.....	90
3.4. Teknik Pengumpulan Data	95
3.5. Uji Instrumen Penelitian.....	99
3.5.1. Pengujian Validitas	99
3.5.2. Pengujian Reliabilitas	100
3.6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	101
3.6.1. Analisis Deskriptif	101
3.6.2. Analisis <i>Structural Equation Model</i> (SEM)	102

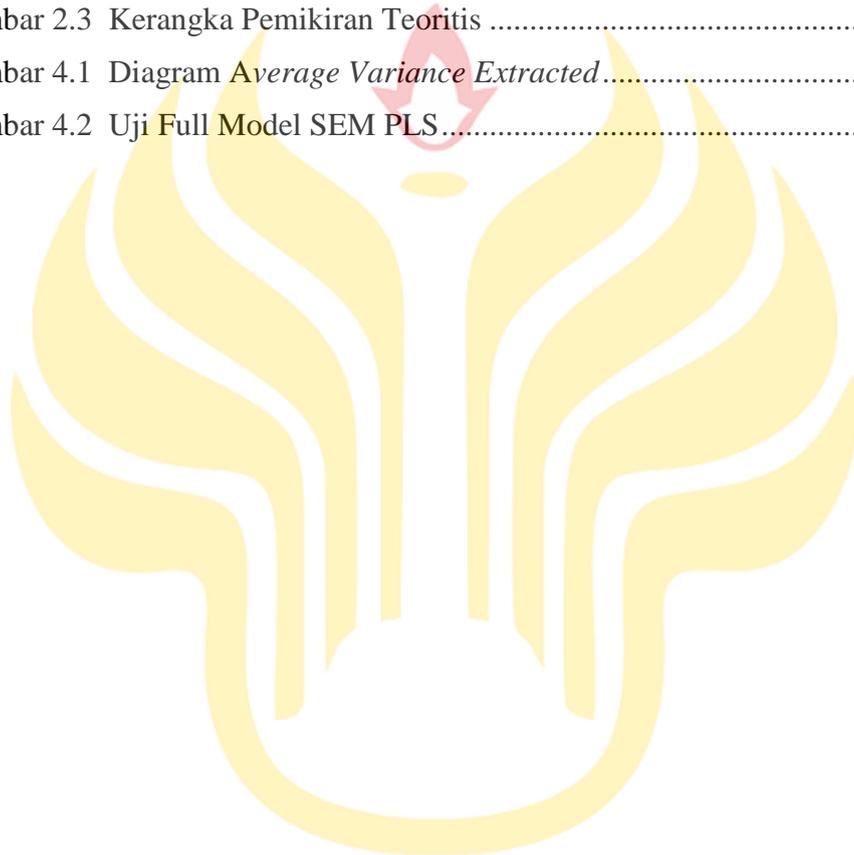
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	108
4.1. Hasil Penelitian.....	108
4.1.1. Analisis Deskripsi	108
4.1.2. Analisis Data.....	120
4.2. Pembahasan	129
4.2.1. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh Negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	130
4.2.2. <i>Conflict of Interest</i> berpengaruh Positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	133
4.2.3. Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh Negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	135
4.2.4. Asimetri Informasi berpengaruh Positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	139
4.2.5. Etika Bisnis Islam berpengaruh Negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.....	140
4.2.6. Religiusitas berpengaruh Negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	142
BAB V PENUTUP	149
5.1. Simpulan.....	145
5.1. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis-Jenis <i>Fraud</i>	37
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	64
Tabel 3.1	Sample Penelitian.....	84
Tabel 3.2	Indikator Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	85
Tabel 3.3	Indikator Variabel Kesesuaian Kompensasi	86
Tabel 3.4	Indikator Variabel <i>Conflict of Interest</i>	87
Tabel 3.5	Indikator Variabel Efektivitas Pengendalian Internal	88
Tabel 3.6	Indikator Variabel Asimetri Informasi.....	89
Tabel 3.7	Indikator Variabel Etika Bisnis Islam	90
Tabel 3.8	Indikator Variabel Religiusitas	90
Tabel 3.9	Definisi Operasional Variabel.....	91
Tabel 3.10	Skor Skala <i>Likert</i>	96
Tabel 3.11	Tabel Indikator dan Butir Pernyataan Kuesioner.....	96
Tabel 3.12	Kriteria Hipotesis Ditolak atau Diterima	107
Tabel 4.1	Rincian Pendistribusian Kuesioner	109
Tabel 4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	110
Tabel 4.3	Data Statistik Responden	111
Tabel 4.4	Deskripsi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	113
Tabel 4.5	Deskripsi Kesesuaian Kompensasi	114
Tabel 4.6	Deskripsi <i>Conflict of Interest</i>	116
Tabel 4.7	Deskripsi Efektivitas Pengendalian Internal	117
Tabel 4.8	Deskripsi Asimetri Informasi.....	118
Tabel 4.9	Deskripsi Etika Bisnis Islam	119
Tabel 4.10	Deskripsi Religiusitas	120
Tabel 4.11	<i>OuterLoadings</i>	121
Tabel 4.12	<i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbachs Alpha</i>	124
Tabel 4.13	Nilai <i>R-Square</i>	125
Tabel 4.14	<i>Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values, P Values)</i>	127
Tabel 4.15	Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Koperasi di Kota Semarang	6
Gambar 2.1 <i>Fraud Triangle</i> (Segitiga Kecurangan)	26
Gambar 2.2 <i>Fraud Tree</i>	35
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	81
Gambar 4.1 Diagram <i>Average Variance Extracted</i>	123
Gambar 4.2 Uji Full Model SEM PLS	126



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	165
Lampiran 2. Data Statistik Responden.....	166
Lampiran 3. Hasil Jawaban Responden Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	167
Lampiran 4. Hasil Jawaban Responden Variabel Kesesuaian Kompensasi	169
Lampiran 5. Hasil Jawaban Responden Variabel <i>Conflict of Interest</i>	171
Lampiran 6. Hasil Jawaban Responden Variabel Efektivitas Pengendalian Internal	173
Lampiran 7. Hasil Jawaban Responden Variabel Asimetri Informasi	175
Lampiran 8. Hasil Jawaban Responden Variabel Etika Bisnis Islam	177
Lampiran 9. Hasil Jawaban Responden Variabel Religiusitas.....	179
Lampiran 10. Uji Validitas.....	181
Lampiran 11. Uji Reabilitas	183
Lampiran 12. Uji <i>Inner (R Square)</i>	184
Lampiran 13. Full Model SEM PLS	185
Lampiran 14. Surat Ijin Penelitian	186
Lampiran 15. Surat Rekomendasi	197
Lampiran 16. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian	198
Lampiran 17. Dokumentasi Penelitian.....	209

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan di dalam suatu kurun waktu tertentu. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan akuntansi dalam perspektif Islam juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban (*accountability*) dari pihak manajemen yang telah diberi amanat kepada pihak-pihak yang terkait yang memiliki kepentingan. Pelaku pasar modal memiliki harapan tinggi sehubungan dengan integritas, transparansi dan kualitas informasi keuangan. Keandalan, transparansi dan integritas proses pelaporan keuangan memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang baik (Zainudin & Hashim, 2016).

Namun, dewasa ini manajemen perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menggambarkan kondisi perusahaan sebaik mungkin, yang mana hal ini dapat mengakibatkan manipulasi laporan keuangan agar kondisi perusahaan terlihat bagus. Informasi yang telah dimanipulasi tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan karena dianggap tidak valid dan andal. Tindakan pemanipulasian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kecurangan (*fraud*). Rezaee (2004) menyatakan bahwa manajemen tingkat atas biasanya terlibat dalam memalsukan laporan keuangan, dan tindakan mereka berdampak pada kinerja keuangan dan hasil perusahaan.

Fraud diyakini menjadi masalah perusahaan yang paling serius dalam lingkungan bisnis saat ini (Kusumantoro et al., 2016). Menurut Tuanakotta (2016:194) *fraud* adalah perbuatan yang disengaja (*intentional act*) oleh satu atau lebih anggota manajemen, atau pengelola, atau karyawan, atau pihak ketiga, melalui penipuan (*deception*) untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melawan hukum (*unjust or illegal advantages*). Dapat dikatakan bahwa kecurangan adalah suatu tendensi dari kecerdasan manusia yang melakukan tindakan-tindakan kriminal atau melawan hukum menggunakan tipu muslihat untuk memaksimalkan kepentingan agar mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan representasi yang salah. Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi.

Kecurangan ini bisa dilakukan oleh manajer dan pegawai yang bertanggungjawab atau unit lain berupa manipulasi pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan kompensasi lebih berdasarkan hasil kinerja yang lebih produktif. Carpenter & Reimers (2005) mengatakan bahwa pelaporan keuangan yang tidak etis ini tidak mudah dideteksi karena keputusan untuk pelaporan keuangan yang tidak etis digabungkan ke dalam laporan keuangan. Hal ini akan berdampak pada adanya tindakan tidak etis seorang manajer atau pegawai yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk bertindak profesional sesuai dengan prinsip pekerjaannya.

Akkizidis & Khandelwal (2008) mengatakan bahwa jumlah terbesar dari kerugian operasional berasal dari kegiatan yang disengaja seperti penyelewengan (*fraud*) dan transaksi oleh pihak yang tidak berwenang (*unauthorized trading*). Dampak penipuan akuntansi telah membuat banyak orang menderita (Prajanto & Pratiwi, 2016). Tingginya nilai kerugian akibat internal fraud mempunyai dampak besar bagi instansi dan nasabah, serta memicu terjadinya resiko reputasi, hal ini mengindikasikan mental dan etos kerja pegawai yang lemah di lingkungan pegawai, selain itu juga akibat lemahnya control dalam pengawasan (Yudiana et al., 2018).

Dewasa ini, reformasi koperasi menjadi salah satu solusi masyarakat untuk menyimpan dan memperoleh permodalan untuk usaha pada koperasi. Khususnya koperasi syariah yang memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Namun dilapangan masih ditemukan kasus-kasus kecurangan akuntansi dalam lingkup koperasi syariah. Seperti yang dikatakan oleh Umar (2017) bahwa industry keuangan syariah secara umum kini ditantang untuk memberikan perannya.

Pada tahun 2015 Koperasi Syariah dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pasal 10 No. 2 dari peraturan diatas menyebutkan bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf. Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum

Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Walaupun berbasis syariah, masyarakat perlu berhati-hati sebab peluang terjadinya *fraud* selain dari manajemen juga berasal dari pihak pegawai. Lembaga keuangan syariah pun tetap ada kemungkinan melakukan kecenderungan kecurangan. Sebagai bagian instrument pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam seperti pada aspek teoritis, operasional, dan implementasi (Iqbal & Mirakhor, 2008:373). Kegagalan perusahaan sejenis koperasi umumnya berasal dari lingkungan internal. Salah satunya disebabkan oleh lemahnya komitmen para pengurus untuk menjalankan koperasi. Oleh karena lemahnya komitmen dan pengawasan memungkinkan terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan koperasi

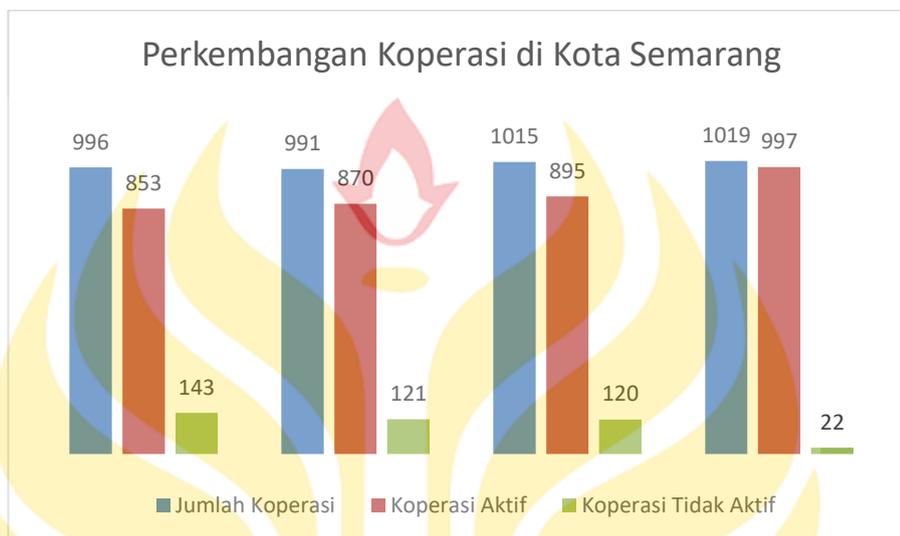
Disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati dalam Rapat Koordinasi Daerah menyebutkan bahwa koperasi yang sehat jika dipersentasekan hanya 18,82% dari 21.455 koperasi, sisanya cukup sehat dan kurang sehat. Selain itu, Ema Rachmawati juga menyebutkan bahwa koperasi yang kasusnya paling banyak adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) (Gutomo, 2018). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa kesadaran lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam masih sangat rendah dalam melaporkan transaksi keuangannya. Padahal dengan melakukan pelaporan keuangannya maka koperasi simpan pinjam dapat ditinjau keadaan keuangannya dan untuk menghindari terjadinya kecurangan (Deny, 2018).

Meskipun perkembangan koperasi ini diimbangi dengan upaya pengawasan yang terus dilakukan sebagai bagian dari Reformasi Koperasi yang bertujuan untuk menciptakan koperasi yang berkualitas, kasus terkait koperasi masih terjadi. Celah penyimpangan atau kasus pada koperasi ini antara lain karena pengawasan masih lemah dan regulasi bagi Koperasi Simpan Pinjam yang masih longgar. Salah satunya adalah kasus investasi bodong yang dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon yang mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil 5% per bulan, yang telah merugikan 7 ribu orang anggota dengan jumlah kerugian mencapai Rp2 triliun (Chandra, 2016). Kecurangan lain berbentuk bisnis investasi berkedok koperasi membuat citra koperasi memburuk.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bermasalah di Jawa Tengah yang lain pun mulai bermunculan. Setidaknya ada beberapa KSP yang masalahnya muncul di publik yaitu KSPPS Bina Usaha Mandiri di Salatiga oleh staf pemasaran yang melakukan penggelapan dana simpanan anggota. KSP Jasa Mandiri yang memiliki kantor di Semarang melakukan penggelapan dana oleh pihak internal koperasi dan lainnya. Mayoritas KSP bermasalah ini disebabkan oleh manajemen kepengurusan

hingga penyalahgunaan kewenangan pengurus untuk keperluan pribadi (Arifin, 2016).



Gambar 1.1 Perkembangan Koperasi di Kota Semarang
Sumber: Dinas Koperasi dan UMK Kota Semarang

Ditinjau dari perkembangan koperasi di Kota Semarang pun terus meningkat. Hingga tahun 2017 jumlah koperasi yang terdaftar dan aktif di Kota Semarang mencapai 997 koperasi baik syariah dan non syariah. Koperasi syariah pun jumlahnya terus meningkat. Namun masih banyak terjadi kasus kecurangan koperasi di Kota Semarang, dari hasil observasi awal di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang oleh Ayuningtias (2017) menyebutkan bahwa sedikitnya ada 5% dari jumlah koperasi mempunyai kasus kecurangan akuntansi berskala besar. Tidak hanya kasus kecurangan yang berskala besar saja yang terjadi, namun banyak ditemukan kasus kecurangan berskala kecil dan menengah dimana kasus tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan (Ayuningtias, 2017). Selain juga koperasi di Kota Semarang belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan dalam SAK ETAP, hal ini mengindikasikan terjadi kecenderungan kecurangan sehingga

koperasi enggan menggunakan jasa audit eksternal (Nurlaeliyah & Anisykurlillah, 2017).

Hasil observasi awal pada penelitian Ayuningtias (2017) yang juga melakukan wawancara dengan Supriyono, SH. Selaku pegawai Bagian Pengawasan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga memperoleh hasil bahwa kecurangan akuntansi yang terjadi pada koperasi-koperasi di Kota Semarang sebagian besar disebabkan oleh adanya pinjaman fiktif yang dicatat oleh pengurus. Bentuk pinjaman fiktif yang dilakukan disini adalah ketika pengurus mencatat bahwa koperasi telah memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada pihak lain namun ternyata pinjaman tersebut tidak pernah diberikan oleh koperasi. Pinjaman fiktif yang dilakukan oleh pengurus ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang ada pada koperasi.

Beberapa koperasi bahkan mengalami mati suri. Banyak faktor yang menyebabkan koperasi mati suri. Di antaranya kelonggaran regulasi pendirian koperasi namun pengawasannya masih kurang dan manajemen organisasi dan manajemen usaha (Saputro, 2017). Salah satu kasusnya adalah terjadi pada Koperasi Sinergi Inti Artha dimana ketua koperasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyaluran dana program kemitraan yang bersumber dari dana tanggung jawab social perusahaan (CSR) PT Perkebunan Nusantara IX Semarang pada 2012 sebesar Rp1.25 miliar (Senjaya, 2016). Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terjadi di badan usaha berbentuk koperasi sekalipun, hal tersebut juga didominasi oleh penyelewengan wewenang oleh ketua atau pemilik koperasi.

Ditinjau dari kasus koperasi khususnya koperasi syariah pun menimbulkan citra bahwa adanya unsur syariah tidak menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan. Adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah bebas dari tindakan kecurangan. Terungkapnya kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa koperasi besarpun rentan terhadap penyalahgunaan fungsi dari koperasi. Dengan adanya penyimpangan yang dilakukan pengurus tersebut, maka upaya pengembangan koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu peran serta anggota koperasi sangat menentukan terutama dalam menjaga citra koperasi di mata masyarakat (Arsinta & Widiyanto, 2018).

Sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan operasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, namun lembaga keuangan syariah ini mulai dihantam berita-berita yang kurang baik soal pelaksanaan tata kelola dan pengawasan yang ternyata dapat dibobol dan dipermainkan bahkan oleh pihak internal sendiri. Nama besar syariah yang diusungnya kemudian menjadi tercemar. Meski yang terbentur masalah adalah risiko operasionalnya, sisi syariah tetap saja dipertanyakan. Sebab untuk kesekian, lembaga ini diuji, bahwa entitas syariah juga ternyata tidak kebal dari *moral hazard*.

Alasan peneliti memilih populasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terbentuk dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) karena di kota Semarang sendiri kapasitas dan kualitasnya dinilai semakin prospektif. Deputi

Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan KSPPS memiliki peluang dan prospek ke depan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial sekaligus. KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan di sisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh, dan Wakaf atau ZISWAF. Aspek bisnis (tamwil) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil karena data terakhir menyebutkan baru pada kisaran 19 – 21 % UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan (Zuraya, 2016).

Ditinjau dari perkembangan dan karakteristik KSPPS tersebut, praktik pencucian uang bisa terjadi di koperasi simpan pinjam, mengingat peranannya sebagai satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat menyimpan uang, hal ini menarik peneliti untuk menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi banyak dilakukan di sektor pemerintahan daerah dan desa seperti yang telah dilakukan oleh Adinda & Ikhsan (2015); Chandra & Ikhsan (2015); Faisal (2013); Faradila (2018); Najahningrum (2013); Purnomo & Khafid (2017); Zulkarnain (2013), sedangkan penelitian mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor koperasi masih jarang diteliti, peneliti yang telah melakukan di sektor tersebut antara lain Nurlaeliyah & Anisykurlillah (2017); Ayuningtias (2017); dan

Nugroho (2017), diantaranya meneliti di KPRI dan Koperasi Wanita, sedangkan penelitian di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah jarang ditemui.

Pelaku kecurangan memiliki berbagai macam motivasi yang dijelaskan dalam tiga kondisi dalam Teori *Fraud Triangel*.. Tiga kondisi ini disebut segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam (Tuanakotta, 2010). Kondisi ini terdiri dari tiga komponen yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Pertama, *Pressure* (tekanan) yaitu *fraud* yang dilakukan oleh individu akibat adanya tekanan dari pihak – pihak tertentu, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain – lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini sering dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain itu mengapa Cressey menyebutkan bahwa faktor ini sebagai “*a perceive non-shareable financial need*”, dan kebutuhan ini tidak dapat diselesaikan secara bersama – sama sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan.

Kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya didominasi dengan penggelapan dana/ korupsi oleh pemilik bahkan pegawai, hal ini merupakan faktor kesengajaan untuk kepentingan keuntungan pribadi. Kesesuaian kompensasi diduga memiliki kaitan yang erat dengan kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Kompensasi merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pegawai yang pada akhirnya turut berperan pada niatan melakukan kecurangan. Tekanan finansial yang dihadapi oleh seseorang

dapat menjadi dorongan untuk melakukan tindakan penggelapan uang. Tekanan finansial bisa datang dari kompensasi kerja yang diterima pegawai.

Kusumastuti & Meiranto (2012) menjelaskan bahwa dengan adanya kompensasi yang sesuai maka kecurangan akan berkurang Individu diharapkan telah mendapat kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Ketika pegawai merasa kompensasinya sesuai dan cukup, hal tersebut akan menghindarkan pegawai melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi atau pencurian asset dan yang lainnya karena perusahaan sudah memperhatikan kesejahteraan pegawai. Berbeda jika perusahaan tidak memberikan kompensasi yang sesuai, hal tersebut dapat menjadi faktor tekanan bagi pegawai untuk bertindak curang demi menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Thoyibatun, 2012); Najahningrum, (2013); Frilia (2015); Rahmantari & Novianti (2016) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian dari Wilopo (2006), Kusumastuti (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa terdapat *research gap* dalam penelitian ini terkait pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor tekanan yang lain adalah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan atau organisasi. Oktaviani et al., (2017) menyebutkan

bahwa *conflict of interest* adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang yang mendapatkan kekuasaan berdasarkan peraturan perundangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya (Oktaviani et al., 2017). Konflik kepentingan antara penyaji dan pengguna informasi akuntansi juga dapat timbul dalam Koperasi Manajemen koperasi perlu dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada dilaksanakannya fungsi pertanggungjawaban dengan baik olen pengurus koperasi (Ardiansah, 2009). Atas dasar asumsi tersebut peneliti tertarik untuk menguji variabel *conflict of interest* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

Menurut penelitian Oktaviani et al., (2017) mengungkapkan bahwa konflik kepentingan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan akuntansi. Hal ini sesuai dengan teori *fraud triangle* dikarenakan saat terjadi konflik kepentingan dalam suatu organisasi, maka akan menimbulkan tekanan karena kepentingan pribadi dalam diri masing-masing pengurus yang kemudian menimbulkan ketidakselarasan tujuan antar individu dalam organisasi yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada tindakan kecurangan. Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti menambah variabel *conflict of interest* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kedua adalah kesempatan (*opportunity*) adalah suatu kondisi yang membuka peluang seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Kesempatan ini

biasanya terjadi karena adanya pelanggaran mengenai aturan yang ada sehingga seseorang dapat menggunakan pelanggaran tersebut untuk melakukan *fraud*. Kasus-kasus pinjaman fiktif yang terjadi pada koperasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang tidak efektif membuka celah atau peluang pegawai dalam instansi atau lembaga tersebut melakukan tindakan kecurangan karena tidak mendapatkan pengawasan yang ketat. Pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu meminimalisir kecenderungan pegawai untuk bertindak menyimpang dengan melakukan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan akan setiap proses atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Hal ini tidak terbatas pada manajemen saja, Pengendalian Internal juga harus dilakukan oleh seluruh anggota dalam instansi tersebut.

Penelitian terdahulu Amita (2013) mengatakan bahwa ada lima risiko yang dihadapi koperasi syariah yaitu risiko *lack of skill*, *moral hazard* dan *advers selection* (kurangnya informasi) risiko lainnya adalah *fraud*, risiko ini dapat terjadi karena tidak adanya pemisahan tugas diantara bagian yang menerima pembayaran dan bagian yang mencatat pembayaran tersebut, sehingga ketika ada kesempatan, pegawai tersebut bisa saja melakukan kecurangan. Hal ini berkaitan dengan teori *fraud triangle* dimana pengendalian internal merupakan suatu kesempatan yang bisa memberikan peluang kepada pengurus koperasi untuk melakukan tindakan kecurangan terlebih jika pengendalian internal yang dilakukan koperasi syariah tidak efektif, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap laporan keuangan sehingga tidak ada pengendalian terhadap laporan keuangan koperasi.

Hubungan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Wilopo (2006), Thoyibatun (2012), Chandra & Ikhsan (2015), serta Aminah & Faramitha (2016) yang mengatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti bahwa semakin efektif pengendalian internal tersebut maka semakin menurun tendensi pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi. Dalam penelitian Puspasari & Suwardi (2016) juga mengatakan bahwa pengendalian internal terbukti dapat mencegah seseorang dengan moral yang rendah untuk melakukan kecurangan.

Namun dalam penelitian lain Wilopo (2008) menunjukkan bahwa secara partial pengendalian intern birokrasi tidak secara signifikan mempengaruhi *fraud*. Kusumastuti & Meiranto (2012); Frilia (2015); dan Rahmantari & Novianti (2016) juga menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*),

Disamping itu, berdasarkan data *Asia-Pacific Fraud Survey* tahun 2013 oleh KAP Ernst & Young dalam (Pamungkas, 2014), sebanyak 79% dari responden Indonesia menyatakan bahwa kasus kecurangan sudah tersebar luas, terutama pada kasus penyuapan dan korupsi. Dari hasil survei tersebut, responden menyatakan bahwa lemahnya pengendalian dan pengawasan juga turut mendorong terjadinya tindakan kecurangan. Dengan alasan tersebut, peneliti ingin menguji apakah

pengendalian internal mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Anshar (2012) mengatakan bahwa kecurangan pelaporan keuangan sering digunakan oleh perusahaan dalam kondisi krisis finansial dan dimotivasi oleh *opportunities* yang salah arah (*misguided opportunities*). Kesempatan ini biasanya terjadi karena adanya kelonggaran mengenai aturan yang ada sehingga seseorang dapat menggunakan kelonggaran tersebut untuk melakukan *fraud*. Faktor yang mempengaruhi peluang dalam lingkup organisasi antara lain dikarenakan adanya asimetri informasi dalam organisasi, hal ini berkaitan dengan teori *fraud triangel* dimana saat situasi pihak internal lebih mengetahui informasi-informasi penting dalam suatu perusahaan, hal tersebut menjadikan peluang pihak internal tersebut untuk melakukan kecenderungan kecurangan, karena terdapat kesempatan atau peluang yang salah arah karena tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian Wilopo (2006); Chandra & Ikhsan (2015); dan Frilia (2015) menunjukkan bahwa asimetri informasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Mustika et al., (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil ini tidak sesuai atau berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wilopo, 2006). Inkonsistensi hasil penelitian ini menjadi alasan peneliti untuk menguji kembali pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ketiga, *Rationalization* (rasionalisasi) yaitu *fraud* yang terjadi karena adanya pola pikir atau rasionalisasi dari pelaku yang menganggap bahwa tindakan *fraud* tersebut benar dan wajar serta dapat diterima oleh masyarakat dengan alasan tertentu. Rasionalisasi yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan atau orang-orang yang berada pada keadaan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalkan tindakan kecurangan. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur karena menyangkut pemikiran yang menilai tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, namun bagi sebagian golongan masyarakat tertentu hal itu tidak bisa diterima secara moral dalam suatu masyarakat normal.

Etika bisnis Islam adalah salah satu faktor pembenaran mengapa individu cenderung melakukan kecurangan atau tidak. Sebagian orang beranggapan bahwa perilakunya merupakan hal yang wajar dilakukan merupakan seseorang dengan etika moral yang rendah. Etika bisnis Islam mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki komitmen pada dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Chandra & Ikhsan (2015) menyebutkan bahwa etika manajemen akan menjadi tolok ukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena seorang individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar yang ada di dalam suatu organisasi, maka individu merasa apa yang dilakukannya sudah benar karena sebagian besar rekannya juga melakukan hal yang sama walaupun yang dilakukan itu merupakan suatu bentuk tindakan kecurangan.

Tata nilai/ etika bisnis Islam ini diletakkan sebagai regulator kehidupan guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia yang cenderung egoistis dan liar, ditengah kemajuan zaman modern sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat untuk semakin akrab dengan tata nilai kehidupan yang rusak tersebut. Beberapa peneliti terdahulu meneliti etika bisnis Islam yang dikaitkan dengan perilaku ekonomi, termasuk persepsi sampai dengan dampak yang ditimbulkan (Darmawati, 2012); (Faraby & Faiza, 2014); (Hakim, 2013); dan (Maharani, 2013).

Dalam penelitian Maharani (2013) menyebutkan bahwa etika bisnis Islam berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik etika bisnis Islam pegawai dalam berbisnis maka akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai. Jika seseorang dengan moral yang rendah berada dalam lingkungan bisnis yang baik, maka ia akan mengikuti lingkungan bisnis yang baik pula. Apalagi seorang individu dengan tingkat etika yang tinggi penilaian akan mempertimbangkan dampak dari tingkah lakunya pada orang lain dan dengan demikian kecenderungan sengaja menyesatkan para pemegang saham dan kreditor melalui laporan keuangan yang curang akan berkurang (Uddin & Gillett, 2002).

Menurut Sedmak dan Nastav (2010) dalam (Mukhibad, 2014) merupakan bahwa praktik tidak beretika pada organisasi kemungkinan besar akan menyebabkan krisis financial. Etika bisnis yang buruk menyebabkan karyawan mudah melakukan kecurangan (*fraud*) (Mukhibad, 2014). Hukum Islam dapat dijadikan sebagai dasar untuk menurunkan kecenderungan *fraud*. Koperasi syariah

diharapkan akan lebih aman dari kejahatan keuangan selama koperasi syariah memegang teguh prosedur-prosedur syariah.

Variabel terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiusitas individu. Menurut Glock dan Stark dalam (Pamungkas, 2014) religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau nilai-nilai tertinggi. Hasil penelitian Barnett et al., (1996) menunjukkan bahwa religiusitas mempengaruhi standar moral seseorang.

Menurut Riahi-Belkaoui & Picur (2000) *fraud* dalam lingkungan akuntansi yang meningkat selain menyebabkan kerugian besar, juga akan menciptakan masalah moral di tempat kerja. Manusia yang memiliki level religiusitas yang tinggi akan lebih mampu mengontrol diri, mempunyai rasa empati dan memperhatikan kepentingan orang lain, hal ini dibuktikan oleh penelitian Pamungkas (2014) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Teori *fraud triangle* juga dapat dikaitkan dengan variabel religiusitas, dimana ketika perilaku religiusitas ini diterima dikalangan sosial dan besar kontrol yang dirasakan akibat berperilaku religius, seseorang akan cenderung berperilaku religius yang kemudian akan mengurangi tindakan tidak etis seperti kecurangan. Begitu pula dengan teori Al-Wala', seseorang dengan religiusitas dan etika bisnis Islam yang tinggi akan condong mencintai apa yang dicintai Allah SWT, dan melakukannya dengan komitmen demi pertanggungjawabannya kepada Allah yang

kemudian diikuti dengan pertanggungjawabannya kepada entitas dan *stakeholder* dengan memberikan kinerja dan kontribusi yang maksimal serta menghindari perilaku tidak etis seperti kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun pada penelitian Ika & Dita (2017) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan pada variabel religiusitas individu terhadap kecenderungan kecurangan. Hal-hal di atas dan inkonsistensi hasil penelitian melatarbelakangi peneliti untuk menambahkan variabel religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kecurangan akuntansi pada koperasi khususnya Kota Semarang banyak terjadi. Tindakan-tindakan pelanggaran sebagai salah satu kecurangan merupakan fenomena yang perlu dikaji lebih mendalam (Sukirman & Sari, 2013). Untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, koperasi wajib memiliki kebijakan terkait dengan pedoman perilaku yang mencerminkan *akhlaqul karimah* (budi pekerti yang mulia). Dengan alasan tersebut peneliti tertarik menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang sebagai populasi dalam penelitian. Melalui implementasi pedoman perilaku ini diharapkan koperasi syariah dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dihindari. Apabila instansi melakukan kecurangan otomatis hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat berkurang akan menimbulkan *rush* dan koperasi dapat mengalami *colaps*.

Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dipanggil sebagai negara Muslim membuat orang memiliki kepekaan penerapan hukum Islam di setiap kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam

proses bisnis orang Indonesia berharap untuk dikelola dengan tidak menyimpang dari hukum Islam (Wahyuni et al., 2018). Sebuah tantangan besar bagi perusahaan dengan konsep syariah, karena sebagus apapun sistem yang dibangun dalam perusahaan tidak akan berarti ketika etika tidak dijalankan (Nawatmi, 2010). Itu sebabnya selain variabel kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, conflict of interest dan asimetri informasi, etika bisnis Islami dan religiusitas menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan syariah terutama pada Koperasi Syariah. Melalui implementasi nilai-nilai Islam pada dan etika bisnis Islami akan membimbing aktivitas ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga terhindar dari tindakan kecurangan.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, latar belakang pemilihan variabel dan inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pegawai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Masih banyak terjadi kasus kecurangan akuntansi di Koperasi Kota Semarang, sedikitnya ada 5% dari jumlah koperasi tersebut mempunyai kasus kecurangan akuntansi yang berskala besar. Tidak hanya kasus kecurangan yang berskala besar saja yang terjadi, namun banyak ditemukan juga kasus kecurangan

berskala kecil dan menengah dimana kasus tersebut hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

2. Observasi awal peneliti pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga memperoleh informasi bahwa Koperasi di Kota Semarang belum sepenuhnya mematuhi aturan-aturan yang ada dalam SAK ETAP. Hal ini mengindikasikan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di dalamnya (Nurlaeliyah & Anisykurlillah, 2017).
3. Masih banyak ditemui koperasi yang mati suri akibat dari kelonggaran regulasi pendirian koperasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan.
4. Observasi awal yang dilakukan peneliti di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang juga memperoleh informasi bahwa bentuk kecurangan yang terjadi pada koperasi-koperasi di Kota Semarang sebagian besar adalah adanya pinjaman fiktif yang ditulis oleh pengurus (Ayuningtias, 2017).

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perlu dibatasi topik permasalahan yaitu meneliti pengaruh Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang yang akan dibatasi beberapa variabel pengaruhnya. Variabel yang digunakan untuk menilai pengaruh Kecenderungan Kecurangan Akuntansi adalah Kesesuaian Kompensasi, *Conflict of Interest*, Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Etika Bisnis Islam, dan Religiusitas. Pembatasan waktu penelitian ini adalah bulan Agustus 2018, dengan menggunakan

metode kuesioner yang disebarakan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Semarang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah *conflict of interest* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
5. Apakah etika bisnis Islam berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
6. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris dengan menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk memberikan bukti empiris dengan menguji dan menganalisis pengaruh *conflict of interest* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk memberikan bukti empiris dengan menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk memberikan bukti empiris dengan menguji dan menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5. Untuk memberikan bukti empiris dengan menguji dan menganalisis pengaruh etika bisnis Islam terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
6. Untuk memberikan bukti empiris dengan menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan.

1.6. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dan sebagai referensi penelitian selanjutnya, dengan harapan ada pengembangan serta inovasi yang lebih bagus dalam model penelitian yang belum pernah diuji agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat lebih berkembang dari penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pegawai koperasi diharapkan dapat menambah motivasi serta wawasan untuk lebih memperhatikan dan menaati lagi aturan-aturan dan nilai-nilai Islami yang sudah ditetapkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan di koperasi.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang kecurangan menarik untuk diteliti karena dilakukan ada perusahaan di akar rumput. Maksudnya adalah bahwa kecurangan tersebut faktor utamanya adalah dari karyawan internal dimana dalam hal ini sebagai akar rumput sebuah perusahaan. Orisinalitas penelitian pada penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris baru mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi dengan objek penelitian syariah, yang mana masih sangat jarang penelitian mengenai kecurangan akuntansi.

Penelitian ini memiliki kebaharuan terkait pemilihan objek penelitian yakni koperasi syariah. Peneliti memilih Koperasi Syariah di Kota Semarang sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah Koperasi Syariah yang menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah masih ditemukan kecenderungan kecurangan akuntansi atau tidak. Selain itu, peneliti memodifikasi variabel pada variabel bebas atau variabel independen penelitian. Perbedaan adalah terkait variabel independen dimana pada penelitian ini peneliti menambah *conflict of interest*, etika bisnis Islam, dan religiusitas sebagai variabel independen.

Orisinalitas lain dari penelitian ini adalah peneliti menambahkan teori baru yaitu Teori Al Wala'dimana teori ini belum pernah dikaji dalam penelitian

kecenderungan kecurangan akuntansi dan dikaji untuk variabel etika bisnis Islam dan religiusitas. Teori ini menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan Pencipta-Nya dan sesamanya, dengan diikuti dengan rasa tanggung jawab dan komitmen yang baik dalam setiap perilakunya. Selain itu, orisinalitas lain adalah peneliti menjadikan pengurus koperasi lain atau bagian operasional sebagai subjek penelitian dimana penelitian sebelumnya hanya memilih pengurus koperasi dengan jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Alasan peneliti memilih bagian operasional atau pengurus lain koperasi adalah kecurangan bisa saja dilakukan oleh semua jabatan atau pengurus dalam koperasi. Ditinjau dari kasus-kasus yang sudah terjadi, bahwa kecurangan dilakukan oleh pegawai hingga jabatan paling bawah sekalipun bukan hanya oleh pemilik ataupun manajemen tingkat atas. Selain itu, masih banyak ditemui kerangkapan jabatan dalam koperasi dimana hal ini bisa menjadi celah terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

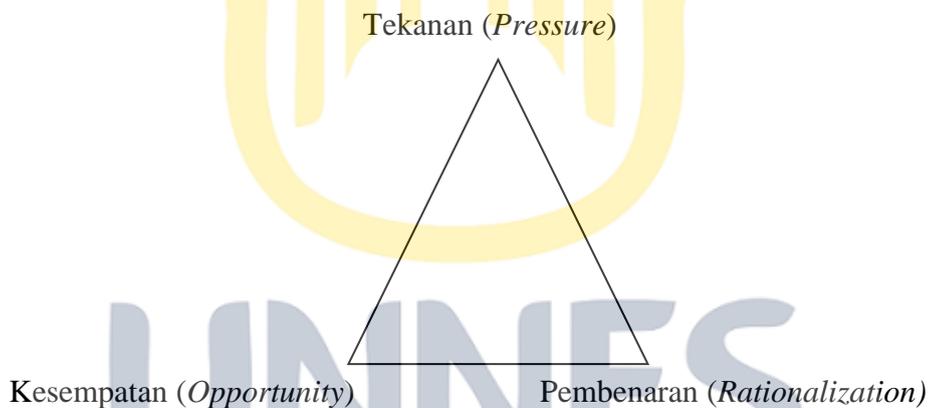
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama

2.1.1. Teori Fraud Triangle

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *fraud triangle theory* atau konsep segitiga kecurangan. *Fraud triangle theory* ini pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1953). Dalam *fraud triangle theory* yang dijelaskan oleh Cressey (1953) bahwa ada tiga kondisi yang umumnya timbul pada saat terjadinya kecurangan (*fraud*), yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).



Gambar 2.1 *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan)

Sumber: *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953)

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan motivasi dari diri individu untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan

non keuangan dari diri individu maupun tekanan dari organisasi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (*perssure*) antara lain masalah keuangan dan non keuangan. Tekanan yang berasal dari keuangan seseorang seperti kecanduan judi atau kebutuhan keuangan tiba-tiba, sementara tekanan yang berasal dari non keuangan seseorang dapat berupa kurangnya disiplin atau keserakahan. Montgomery et al. (2002) mengatakan tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan bentuk persepsi (*indirect*). Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

Hal ini berkaitan dengan variabel kesesuaian kompensasi dan *conflict of interest*. Ketika pegawai memiliki kesesuaian kompensasi yang baik, seseorang tersebut akan merasa disejahterakan oleh instansi yang memberikannya kompensasi atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Lain halnya jika instansi tidak memberikan kompensasi yang sesuai, yang kemudian akan menimbulkan tekanan finansial pada pegawai karena merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan jasa yang telah diberikan dan kurang dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini akan mendorong pegawai melakukan tindakan kecurangan.

Selain itu benturan kepentingan atau *conflict of interest* juga menjadi tekanan seseorang melakukan kecurangan. Kondisi dimana pegawai memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda dengan pemilik akan menimbulkan konflik kepentingan yang kemudian berujung pada *fraud*. Pegawai merasa tertekan jika kepentingannya tidak tercapai sehingga cenderung melakukan segala macam cara meskipun melawan aturan dan tujuan perusahaan demi memaksimalkan utilitasnya sendiri.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan atau peluang (*Opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan tersebut biasanya terjadi karena adanya pengendalian internal instansi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/ atau penyalahgunaan wewenang. Diantara unsur-unsur *fraud triangle*, *opportunity* merupakan unsur yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan *control* dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

Menurut Montgomery et al. (2002) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidaktertanggungjawaban, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak efektif akan menimbulkan celah yang kemudian menjadi peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Selain itu asimetri informasi juga bisa menjadi peluang seseorang melakukan

kecenderungan kecurangan karena terdapat kesenjangan informasi di dalam instansi akan membuat pengurus atau manajemen koperasi lebih mengetahui informasi dalam koperasi yang kemudian dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindakan sesuai tujuan mereka dan berujung kepada tindakan *fraud*.

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi pegawai atau penalaran moral yang lain. Diargumentasikan pula oleh Rae & Subramaniam (2008) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima. Bagi mereka yang umumnya memiliki moral yang rendah dan tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi kecurangan. Bagi mereka dengan standar moral yang lebih tinggi, hal tersebut menjadi tidak begitu mudah. Pelaku fraud akan berusaha untuk selalu mencari pembenaran secara rasional bagi dirinya untuk membenarkan perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan variabel etika bisnis Islam dan Religiusitas, bahwa dalam suatu lingkungan pekerjaan memiliki tingkat etika bisnis Islami dan Religiusitas yang tinggi, pegawai akan cenderung mengikuti peraturan dan kemudian hal tersebut menjadi faktor pembenaran seseorang melakukan kecenderungan kecurangan atau tidak. Bagi mereka dengan moral dan

religiusitas yang rendah tentu akan merasionalisasikan tindakan kecenderungan kecurangan sebagai suatu tindakan yang wajar.

2.1.2. Teori Al-Wala'

Kata Al'wala' menurut terminologi syariat berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhoi Allah berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang. Menurut Jayanto (2016: 163) seseorang yang menerapkan prinsip Al-wala' akan mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen. Teori ini menekankan bahwa semua urusan yang dilakukan seorang individu, dilakukan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab kepada sesama dan Pencipta-Nya.

Menurut Jayanto (2016:165) implementasi sikap Al-wala' dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Implementasi sikap Al-wala' terhadap Allah SWT

Bentuk penerapan sikap Al-wala' terhadap Allah SWT adalah dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah maghdoh dah ghoiru maghdoh dengan kontinu (istiqomah) dengan mengharap keridhoan Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT (fii sabilillah).

b. Implementasi sikap Al-wala' terhadap entitas

Bentuk penerapan sikap Al-wala' terhadap entitas yaitu dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktifitas

dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemaslahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan.

c. Implementasi sikap *Al-wala'* terhadap *stakeholders*

Bentuk penerapan sikap *Al-wala'* terhadap *stakeholders* yaitu dengan cara memilih *stakeholders* Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari *Al-qur'an* dan *Al-Hadist*.

Teori ini mendukung asumsi bahwa etika bisnis Islam dan religiusitas merupakan bentuk loyalitas seseorang kepada Allah SWT, entitas, dan *stakeholders*. Etika seseorang dalam bekerja dan berbisnis merupakan tolak ukur bagaimana perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan wewenang yang dimiliki dalam bekerja dan berbisnis untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Seseorang dengan etika bisnis Islam yang tinggi akan menghindari hal-hal yang dibenci Allah, salah satunya adalah berbuat curang dan tidak jujur. Selain itu, religiusitas pegawai juga akan membuat pegawai tersebut memiliki komitmen bekerja sesuai syariat yang kemudian akan memberikan kontribusi yang berarti pada entitas dan *stakeholders* serta memberikan segenap tenaga dan pikirannya untuk meningkatkan produktivitas entitas tanpa melanggar aturan dan kejujuran pekerjaannya terhadap *stakeholders* dan Allah SWT, sehingga entitas tersebut dapat bermanfaat untuk memberikan kemaslahatan atau berguna bagi masyarakat serta lingkungan.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.2.1.1. Definisi dan Konsep Kecurangan Akuntansi

1. Definisi Kecurangan Akuntansi

Terdapat banyak definisi mengenai *fraud* yang dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, berikut ini disajikan definisi *fraud* dari beberapa sudut pandang yang berbeda:

- a) *Webster's New World Dictionary* dalam (Zimbelman, 2014:7): Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seseorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.
- b) Tuanakotta (2016:194): *Fraud* adalah perbuatan yang disengaja (*intentional act*) oleh satu atau lebih anggota manajemen, atau pengelola, atau karyawan, atau pihak ketiga, melalui penipuan (*deception*) untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melawan hukum (*unjust or illegal advantages*).
- c) *Association of Certified FraudExaminers* (ACFE): Kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. (www.acfe.com)

d) Arens, Elder, & Beasley, (2015:396): Kecurangan menggambarkan setiap upaya yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja.

2. Kondisi Terjadinya Kecurangan Akuntansi

Menurut Donad R. Cressey dalam (Tuanakotta, (2016:321) menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu:

a. Tekanan (*pressure*)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung seseorang untuk berani melakukan tindak kecurangan. Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana dia merasa bahwa tekanan kehidupan yang cukup begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja kurang atau pola hidup yang serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan.

b. Kesempatan (*opportunity*)

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan.

c. Rasionalitas (*rationalization*)

Pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.

3. Jenis-Jenis Kecurangan

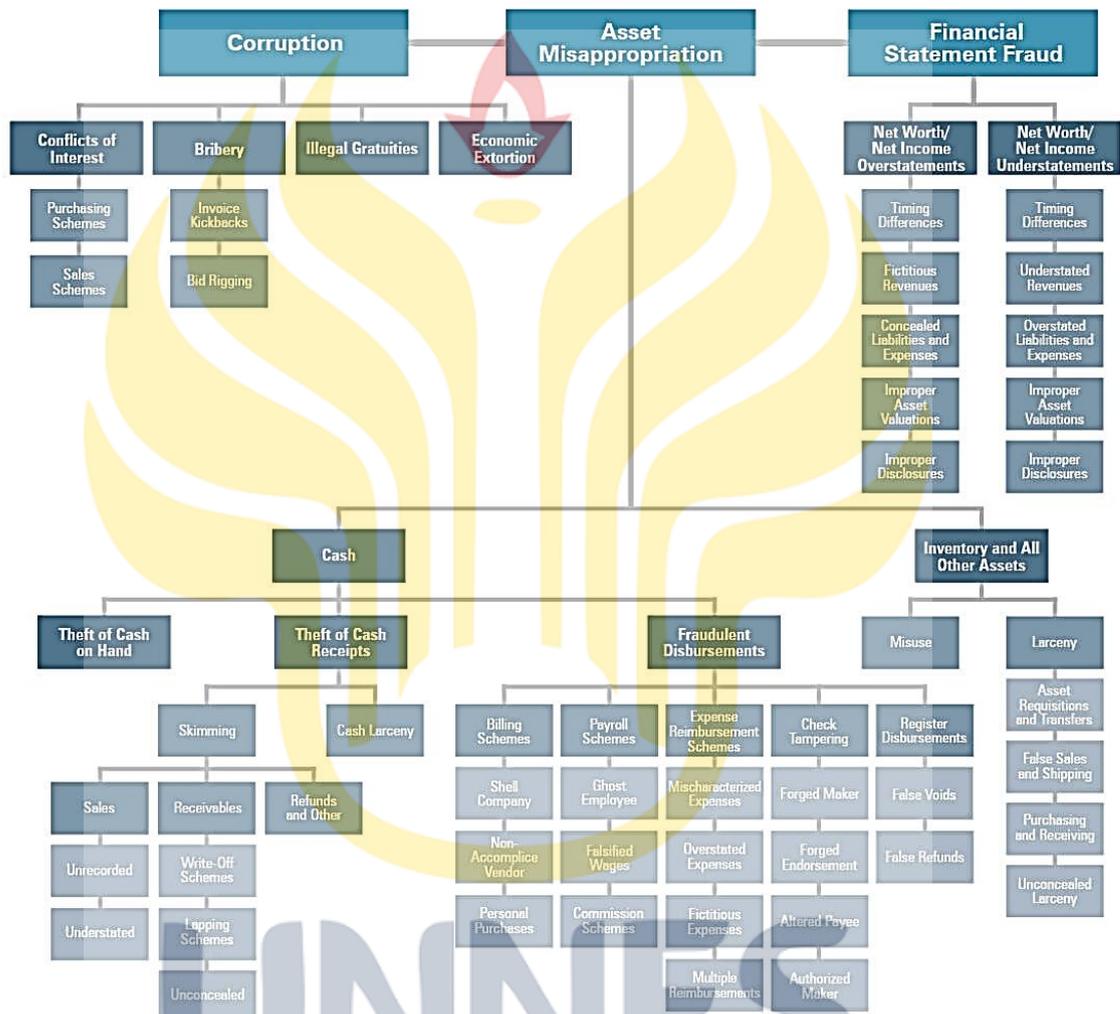
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan *fraud* dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) ke dalam bentuk *fraud tree*.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

THE FRAUD TREE

OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE CLASSIFICATION SYSTEM



Gambar 2.2 Fraud Tree
 Sumber: *The Association of Certified Fraud Examiners(ACFE)*

Menurut laporan *Report to the Nation* oleh Association of Certified Fraud Examiners ACFE tahun 2014 dalam (Tuanakotta (2016:196) pembagian jenis-jenis kecurangan ke dalam tiga tipe didasarkan pada tiga cabang utama dari *fraud tree*, yakni *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements* sebagai berikut:

1) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2). Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga (*conflict of interest*) dalam proyek, penyuapan (*bribery*), pengambilan dana secara paksa (*economic extortion*), permainan dalam tender dan graftifikasi terselubung (*illegal gratuity*).

2) Penjarahan aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Penjarahan aset terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming*, *larcency*, atau *fraudulent disbursement*, dan (2) penyalahgunaan non-kas (*non cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larcency*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

3) Kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Merupakan kecurangan berupa salah saji material dan data keuangan palsu. Seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatement*) atau sebaliknya (*asset/revenue understatement*). Sedangkan data keuangan palsu adalah rekaan data keuangan, misalnya (1)

mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*), (2) menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*), (3) menghilangkan informasi secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosure*), dll.

4. Jenis dan pelaku kecurangan (*fraud*)

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam (Najahningrum, 2013) *fraud* diklasifikasikan menjadi 4 jenis:

Tabel 2.1
Jenis – jenis *Fraud*

Jenis Kecurangan	Korban	Pelaku	Penjelasan
Penggelapan uang atau kecurangan pekerjaan	Pegawai	Pemberi kerja	Pemberi kerja seara langsung atau tidak langsung mengambil hal dari pekerjanya
Kecurangan manajemen	Pemegang saham	Manajemen tingkat atas	Manajemen tingkat atas memberikan penyajian yang salah, pada informasi keuangan
Kecurangan investasi	Investor	Individu	Individu menipu investor
Kecurangan Penyediaan/ logistic	Pembeli barang atau jasa	Penjual barang atau jasa	Mengenakan biaya yang berlebih atas barang dan jasa kepada pembeli

Sumber: *ACFE* dalam (Najahningrum, 2013)

2.2.1.2. Indikator Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Wilopo (2006) menyebutkan beberapa indikator pengukuran kecenderungan kecurangan akuntansi, yaitu :

- 1) Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung lainnya.

Manajemen cenderung akan melakukan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi bukti-bukti

transaksi biasanya dengan mengubah besarnya jumlah yang sebenarnya atau mengabaikan aturan akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunannya, memalsukan dokumen-dokumen pendukung, dan merubah pencatatan jurnal akuntansi terutama dilakukan pada saat mendekati akhir periode. Hal-hal tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan.

- 2) Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan.

Manajemen secara sengaja melakukan salah saji dengan mengabaikan atau menghilangkan suatu peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan dalam laporan keuangan yang dapat memperdayai pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan laba.

- 3) Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja.

Untuk memaksimalkan laba manajemen dapat berbuat curang dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah, seperti merubah asumsi yang terkait pencatatan jumlah, klasifikasi dan pelaporan pada transaksi keuangan.

- 4) Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima.

Manajemen dapat melakukan salah saji yang berasal dari penyalahgunaan atau penggelapan aktiva dengan melakukan rekayasa dalam

laporan keuangan untuk menutup-nutupi pencurian aktiva tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

- 5) Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu diantara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Karena adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu pihak instansi akan berusaha menutupi masalah tersebut dengan melakukan tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Cara yang dilakukan dapat berupa manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung laporan keuangan serta menghilangkan, memajukan atau menunda pencatatan akuntansi yang seharusnya dilaporkan dalam periode laporan keuangan. Tindakan kecurangan tersebut dapat melibatkan satu atau lebih individu baik manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Dan akibat dari tindakan tersebut laporan keuangan yang disajikan pun akan salah dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

2.2.1.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan

Akuntansi

Wilopo (2006) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Keefektifan Pengendalian Internal

- 2) Ketaatan Aturan Akuntansi
- 3) Asimetri Informasi
- 4) Kesesuaian Kompensasi
- 5) Moralitas Manajemen.

2.2.2. Kesesuaian Kompensasi

2.2.2.1. Definisi dan Konsep Kesesuaian Kompensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesesuaian dapat diartikan sebagai keselarasan atau kecocokan. Kesesuaian merupakan suatu keadaan dimana seseorang merasa cocok terhadap apa yang diperoleh. Kesesuaian disini mengacu pada tingkat kepuasan pegawai dalam memperoleh kompensasi. Menurut Werther dan Davis (1982) dalam (Shintadevi, 2015) kompensasi adalah apa yang seseorang terima sebagai balasan atas pekerjaan yang diberikan baik upah perjam ataupun gaji periodik. Menurut Handoko (2014:155) kompensasi penting bagi pegawai sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para pegawai itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Seputra (2014:23) mengatakan bahwa prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab.

Kesesuaian kompensasi merupakan keseluruhan balas jasa yang diterima oleh individu sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan, dan lainnya yang dibayarkan oleh perusahaan. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga

mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja (Delfi, 2014).

Menurut Thoyibatun (2012) kompensasi bagi pegawai merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi organisasi kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, organisasi perlu kehati-hatian dan pengendalian yang baik dalam mengontrol kompensasi supaya kedua kepentingan tersebut dapat tercapai. Salah satu tujuan pegawai memberikan kinerja terbaiknya pada perusahaan adalah guna memperoleh kompensasi yang diinginkan. Pemberian kompensasi yang sesuai dapat meminimalkan tindakan pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi melalui pencurian aset atau penipuan lainnya karena pegawai sudah merasa disesatkan oleh perusahaan.

Rivai (2011:357) menjelaskan kompensasi berdasarkan klasifikasinya terdiri dari dua komponen kompensasi yaitu:

1. Kompensasi Langsung

Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan guna mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi langsung ini terdiri dari:

- (a) Gaji,
- (b) Bonus,
- (c) Insentif.

2. Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua pegawai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Kompensasi tidak langsung berupa:

- (a) Asuransi sosial tenaga kerja
- (b) Tunjangan-tunjangan
- (c) Uang pension, dll

Rivai, (2011:363) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pengaruh lingkungan eksternal meliputi pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, dan serikat pekerja.
- 2) Pengaruh lingkungan internal meliputi anggaran tenaga kerja dan siapa yang membuat keputusan kompensasi.

Tujuan Pemberian Kompensasi menurut Handoko, (2014:156-158) tujuan pemberian kompensasi yaitu:

- 1) Memperoleh personalia yang *qualified*.
- 2) Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang.
- 3) Menjamin keadilan.
- 4) Menghargai perilaku yang diinginkan.
- 5) Mengendalikan biaya-biaya.
- 6) Memenuhi peraturan-peraturan legal.

2.2.2.2. Indikator Kesesuaian Kompensasi

Indikator yang peneliti gunakan yaitu indikator yang diambil dari Gibson et al. (1997) yang menjelaskan indikator untuk mengukur kesesuaian kompensasi terdiri dari empat item pertanyaan yaitu:

1. Kompensasi keuangan, kompensasi yang diberikan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Promosi, memberikan promosi atas dasar prestasi kerja yang dicapai pegawai.
4. Penyelesaian tugas, pegawai diberi tugas sesuai tanggung jawab masing-masing dengan target yang telah ditentukan.

2.2.3. Conflict of Interest

2.2.3.1. Definisi dan Konsep Conflict of Interest

Konflik kepentingan adalah sebuah konflik atau benturan yang terjadi ketika individu atau organisasi yang terlibat dalam berbagai kepentingannya sendiri-sendiri. Konflik akan menimbulkan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Menurut Afran & Ishak (2005) dalam (Septiningrum, 2016) konflik menyebabkan orang lebih mementingkan departemennya sendiri dibandingkan dengan organisasinya secara keseluruhan. Situasi tersebut akan menimbulkan sulitnya mencapai keselarasan tujuan organisasi atau perusahaan. Jika hal tersebut tidak mungkin dicapai akan menyebabkan suatu kebencian terhadap manajemen.

Max Weber dalam (Lubis, 2014:57) menjelaskan bahwa jika suatu organisasi ingin mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif, maka organisasi

tersebut harus dirancang sedemikian rupa dengan birokrasi dan karakteristik pembagian kerja, hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang normal, peraturan yang rinci dan hubungan yang tidak didasarkan pada hubungan pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir konflik yang terjadi di dalam organisasi. Wirawan (2013:1) tanpa pengetahuan dan keterampilan untuk memanajemi konflik, orang-orang di dalam organisasi tidak akan mampu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.

Menurut Oktaviani et al. (2017) konflik kepentingan merupakan penyebab terjadinya korupsi. Dimana konflik kepentingan tersebut merupakan situasi dimana seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan wewenang diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap pengguna wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari kinerja yang seharusnya dan akan berujung pada tindakan *fraud*. Jika konflik kepentingan tersebut dapat dihindari oleh pegawai atau pejabat yang memiliki kekuasaan lebih maka potensi *fraud* juga dapat di minimalisir. Sebaliknya jika terdapat konflik dalam suatu instansi, maka potensi *fraud* akan terjadi.

Menurut Wallase dan Alison dalam (Septiningrum, 2016), konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan

nilai-nilai dipandanginya sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing masing.

Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan dalam Oktaviani et al. (2017) sebagai berikut:

- 1) Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan,
- 2) Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan
- 3) Persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul.

2.2.3.2. Indikator *Conflict of Interest*

Indikator konflik kepentingan, yaitu (Septiningrum, 2016) :

- 1) Kerangkapan jabatan, yaitu seseorang menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- 2) Kekuasaan dan kewenangan.
- 3) Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan fasilitas lainnya.
- 4) Kelemahan sistem organisasi, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan yang disebabkan karena aturan, *job description* yang tidak jelas, SOP, struktur dan budaya perusahaan yang ada.

- 5) Kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/ kebutuhan mengenai hal yang bersifat pribadi.

2.2.4. Efektivitas Pengendalian Internal

2.2.4.1. Definisi dan Konsep Pengendalian Internal

1. Definisi Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut Komaruddin (1994:294) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dengan demikian keefektifan lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dan *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO, 2004) dalam (Rae & Subramaniam, 2008) pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal adalah keberhasilan manajemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Keefektifan pengendalian internal dapat berperan dalam mencegah dan mendeteksi suatu kecurangan akuntansi (*fraud*) dalam suatu instansi.

Tuanakotta (2016:92) menjelaskan bahwa perusahaan atau entitas membangun, melaksanakan, dan memelihara lingkungan serta sistem pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji yang *material*, baik yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*). Selanjutnya Tuanakotta (2016:210) mengatakan bahwa memanfaatkan sistem pengendalian internal adalah untuk mencegah *fraud*, mengendus *fraud*, menemukan *fraud*, dan melakukan tindakan koreksi pasca ditemukannya *fraud*.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Berikut ini merupakan rincian dari tiga (3) tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian yang efektif menurut Arens et al., (2015:340) yaitu:

1) Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan IFRS.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian memiliki peran mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien agar mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi, baik keuangan maupun non keuangan yang akurat berkaitan dengan operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan.

3) Kepatuhan pada hukum dan peraturan

Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba wajib menaati berbagai hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan yang harus dipatuhi berkaitan langsung dan tidak langsung dengan akuntansi. Hukum dan peraturan yang tidak berkaitan langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sedangkan yang berkaitan dengan akuntansi adalah peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.2.4.2. Indikator Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* dalam (Arens et al., 2015:345), pengendalian terdiri dari lima (5) indikator yaitu:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen yang lain, melalui lingkungan pengendalian dapat dipahami bagaimana corak, sikap dan kesadaran orang-orang terhadap lingkungan pengendalian internal. Faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah:

- a) Integritas dan nilai etik
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Dewan Direksi dan Komite Audit
- d) Gaya manajemen dan gaya operasi
- e) Struktur organisasi
- f) Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- g) Praktik dan kebijakan sumber daya manusia

2) Penentuan risiko

Penentuan risiko adalah sebuah aktivitas untuk menganalisis risiko yang dapat terjadi selama pencapaian tujuan. Oleh karenanya, risiko yang telah diidentifikasi tersebut harus dibuat pengelolaannya. Beberapa situasi yang dapat menimbulkan risiko:

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi
- b) Personel baru
- c) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- d) Teknologi baru
- e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- f) Restrukturisasi korporasi
- g) Operasi luar negeri
- h) Standar akuntansi baru

3) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menangkap dan bertukar informasi dalam bentuk dan waktu tertentu dimana orang tersebut memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, sistem akuntansi yang relevan dalam pelaporan keuangan adalah sistem akuntansi yang mencakup metode pengidentifikasian, penggabungan, proses analisis, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi.

4) Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah suatu kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa segala arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pengendalian pemrosesan informasi
- b) Pemisahan tugas
- c) Pengendalian fisik
- d) Telaah kinerja

5) Pemantauan/*monitoring*

Pemantauan adalah proses untuk menentukan apakah kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan sepanjang waktunya. Pemantauan sendiri terdiri atas penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses tersebut dilakukan dengan kegiatan yang berlangsung terus menerus, evaluasi yang terpisah atau dengan kombinasi keduanya.

2.2.5. Asimetri Informasi

2.2.5.1. Definisi dan Konsep Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006). Asimetri informasi timbul karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* dan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Keadaan tersebut dapat menggiring *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak

sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent* demi memberikan informasi yang baik menurut *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya (Wilopo, 2006).

Menurut Scott (2000) dalam (Kusumastuti, 2012) terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham dengan melanggar kontrak yang sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *agent* dan *principal* untuk memanfaatkan pihak lain demi kepentingan sendiri. Menurut Eisenhardt (1989) dalam (Kusumastuti, 2012) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yakni:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).

3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan.

2.2.5.2. Indikator Asimetri Informasi

Variabel asimetri informasi diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) sebagai berikut:

1. Situasi dimana pihak intern perusahaan memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.
2. Situasi dimana pihak intern perusahaan lebih mengenal hubungan *input-output* dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.
3. Situasi dimana pihak intern perusahaan lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.
4. Situasi dimana pihak intern perusahaan lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.
5. Situasi dimana pihak intern perusahaan lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.
6. Situasi dimana pihak intern perusahaan lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.

2.2.6. Etika Bisnis Islam

2.2.6.1. Definisi dan Konsep Etika Bisnis Islam

Etika sangat diperlukan dalam meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena etika dan perilaku orang di dalam perusahaan atau organisasi akan sangat mempengaruhi bagaimana mobilitas perusahaan atau organisasi tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku umum atau tidak. Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keIslaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis (Sampurno, 2016).

Rivai & Usman (2012:230) mengatakan bahwa etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia (*a code or set of principles which people live*). Berbeda dengan moral, etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Lebih lanjut, Rivai & Usman (2012:231) menjelaskan bahwa perbedaan etika bisnis Islam dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terlekat pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis Islam memiliki dua cakupan. *Pertama*, cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif, serta pendidikan. *Kedua*, cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan tanggungjawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai *stakeholder* perusahaan.

Menurut Khairani (2015) etika bisnis Islam berbeda dengan konvensional yang hubungannya tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga Allah. Segala perbuatannya ialah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sehingga dalam melakukan bisnis dan transaksi akan berdampak pada kehidupan di dunia dan akhirat. Etika bisnis Islam mempunyai prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus memiliki komitmen pada dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Suhendra & Badroen (2006) dalam (Maharani, 2013) mengatakan bahwa etika bisnis berarti "*Learning what is right or wrong*", etika bisnis berarti juga etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan. Dalam beretika bisnis, seseorang akan belajar mengenai benar salah, wajar tidak wajar, pantas tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

Dalam Riyadi (2015) argumen lain adalah nilai lebih dari ajaran Islam yang tidak hanya mengajarkan sistem ibadah, tetapi juga berbagai sistem kehidupan, dalam bentuk sistem ekonomi Islam yang akan menjadi *rahmatan lil 'aalamiin* dan mampu menghilangkan keserakahan manusia, yang berbeda dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, sebagaimana dinyatakan oleh Qardhawi (1995). Menurut Syed Nawaib (2003) dalam (Djakfar, (2012:20) titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelaku bisnis itu sendiri, seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami. Akhlak yang baik dalam bisnis Islam, Pertama ialah kejujuran, bahwa dalam hadist “*Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga*” (Khairani, 2015). Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Qardhawi (2004:293) cacat pasar yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuraduk kebenaran dengan *kebathilan*, baik secara dusta atau menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.

Kedua adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas. Ketiga adalah toleran, bahwa rasa toleransi dapat mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal (Khairani, 2015).

Tindakan dan keputusan dianggap sesuai dengan etika apabila tergantung pada niatnya. Niat yang baik diikuti dengan tindakan yang baik dinilai sebagai ibadah. Islam memperbolehkan individu untuk bebas percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang ia inginkan, selama tidak mengorbankan akuntabilitas atau tanggung jawab dan keadilan. Menurut Haider Naqvi (2001) dalam (Djakfar, (2012:22) terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam yang merupakan aksioma-aksioma etik yang meliputi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan, dan

tanggung jawab. Berdasarkan lima aksioma etik ini, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan, proses, bahkan sistem pada suatu perusahaan bisnis mengacu kepadanya agar sesuai dengan etika bisnis Islam. Segala komponen yang terkait dengan perusahaan harus selalu diwujudkan secara baik dan optimal. Berlandaskan kelima aksioma etika bisnis Islam, perusahaan akan terminimalisir dari kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Sampurno, 2016).

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari tujuan etika bisnis menurut Badroen (2015:22), sebagai berikut:

1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam berbisnis
2. Mengenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

Kemudian tujuan etika bisnis secara Islami selain untuk menanamkan dimensi etis dalam berbisnis, adalah dengan bertika bisnis secara Islami tentu para pelaku bisnis akan berorientasi meraih keberkahan dan ridho Allah SWT yaitu dengan memperoleh profit baik materi maupun nonmateri. Dalam hal ini profit materi tentunya adalah keuntungan kita dalam berbisnis dan amal kita dalam berbisnis, sedangkan nonmateri adalah terjalinnya tali persaudaraan dengan akhlak yang baik dan kesabaran dalam berbisnis yang kemudian akan mendekatkan kita kepada Allah SWT.

Islam juga berbicara tentang imbalan yang diberikan kepada seorang pekerja. Sulistiyowati (2014) mengatakan orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Ini adalah konsep pokok dalam agama. Konsep imbalan bukan hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat ukhrawi. Islam mendorong pengusaha untuk memberikan karyawan hak-hak mereka. Perjanjian harus adil dan sah. Karyawan harus mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka harus diberitahu hak-hak mereka dalam hal liburan, kompensasi, dll.

2.2.6.2. Indikator Etika Bisnis Islam

Variabel ini diukur dengan menggunakan lima indikator mengacu pada indikator yang dikembangkan Rafiq Issa Beekum(2004) dalam (Lestari, 2017). Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu :

1) Keadilan (*„adl*)

Keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan kesetimbangan yang harmonis. Sifat keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, tetapi merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim di dalam kehidupannya.

Berlaku adil akan dekat dengan taqwa, termasuk dalam melakukan perniagaan atau berbisnis. Islam melarang untuk ‘menipu’ walaupun hanya untuk sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Hendaknya adil disini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bersama dengan merealisasikan perilaku-perilaku yang menempatkan diri sendiri dan orang lain pada keselamatan duniawi dan akhirat, dengan pembagian manfaat ke semua pihak secara adil dan seimbang.

2) Kehendak bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya (Muhammad, 2002) dalam (Lestari, 2017)

Dalam hal ini, seseorang diberi kebebasan dalam berperilaku namun tetap etis dan rasional serta dalam koridor Islami. Perlu disadari bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk berperilaku, manusia menggunakan akal pikirannya untuk memberikan keputusan apakah harus berperilaku etis atau tidak. Selain itu, dalam situasi apapun, seseorang yang beragama sudah pasti memiliki koridor-koridor atau prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya. Termasuk dalam berbisnis, kebebasan ini hendaknya tidak menimbulkan kontra dan tetap mengedepankan etika.

3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah *kebebasan yang bertanggung jawab*. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan.

Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya. Islam tidak pernah mentolerir pelanggaran atas hak dan kewajiban itu sehingga di sinilah arti penting pertanggungjawaban itu yang harus dipikul oleh manusia.

4) Kebenaran

Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan alam. Semua keputusan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebenaran dalam konteks etika bisnis Islam, selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, tetapi mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kejujuran sangat penting artinya bagi kepentingan masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya.

2.2.7. Religiusitas

2.2.7.1. Definisi dan Konsep Religiusitas

Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktekkan oleh seorang individu. Menurut Mc Daniel & Burnett, (1990) dalam (Fauzan, 2014). Religiusitas juga digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah.

Menurut Glock dan Stark (1965) dalam (Pamungkas, 2014) mendefinisikan religiusitas sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai –nilai suci atau nilai-nilai tertinggi. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghimbau untuk menghindari perilaku yang buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol dari dalam diri untuk pemantauan diri dan penegakan dalam berperilaku dengan moral yang baik.

Barro & McCleary (2014) mengatakan agama dan ekonomi diyakini berinteraksi dalam dua arah. Arah pertama adalah sejauh mana religiusitas merespon pembangunan ekonomi. Arah kedua adalah sejauh mana religiusitas mempengaruhi kinerja ekonomi.. McCleary & Barro (2006) juga mengatakan agama berfungsi untuk mendorong perilaku tertentu. Peran agama dapat mempengaruhi sikap individu, termasuk di dalam bersikap terhadap pelaporan keuangan. Religiusitas seseorang akan mempengaruhi tingkat tanggungjawabnya terhadap informasi dan

laporan yang akan diutarakannya. Hal ini terkait dengan peningkatan kejujuran, keadilan dalam informasi. Di samping itu dengan pengungkapan informasi yang jujur dan adil dapat mengurangi tuntutan hukum. Dyreng, Mayew, & Williams, (2012) menemukan bukti baru tentang peran agama dan norma-norma sosial dalam pelaporan keuangan perusahaan di Amerika Serikat. Manajer perusahaan dengan kepatuhan agama yang tinggi menunjukkan penyimpangan lebih kecil dari harapan (Sulistyo, 2014).

Keberagamaan dalam agama bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga implementasinya dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Fauzan & Tyasari (2012) esensi keberagamaan adalah tauhid atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Esa, Pencipta yang Mutlak dan Transenden, Penguasa segala yang Ada. Seperti dikatakan oleh Ismail Raji al-Faruqi yang dikutip Djamaluddin bahwa seluruh agama, kewajiban untuk menyembah Tuhan, mematuhi perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya, akan hancur begitu Tauhid dilanggar (Ancok, 1994:79) dalam (Fauzan & Tyasari, 2012).

Ini berarti bahwa Tauhid adalah pondasi kuat dari Islam, dan suatu tindakan yang tidak dapat disebut sebagai nilai Islam jika tidak dilandasi oleh kepercayaan kepada Allah SWT. Selain *tauhid* atau *akidah*, pokok pondasi Islam yang lain adalah *Syariah* dan *Akhlaq*. Dimana ketiga bagian tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Akidah adalah sistem kepercayaan dan dasar bagi syariah dan akhlaq. Tidak ada syariah dan akhlaq Islam tanpa akidah Islam (Fauzan & Tyasari, 2012).

Sehingga kalau melihat konsep religiusitas versi Glock & Stark, walau tidak sepenuhnya sama, maka dimensi keyakinan (*ideological*) dapat disejajarkan dengan *akidah*, yang menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap ajaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Sedang praktik agama (*ritual*) disejajarkan dengan *syari'ah*, yang menunjukkan seberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana dianjurkan oleh agamanya. (Fauzan & Tyasari, 2012).

Dimensi pengamalan (*konsekuensial*) disejajarkan dengan *akhlaq*, salah satunya adalah dengan berlaku jujur, memaafkan, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, dan sebagainya. Dimensi pengetahuan (*ilmu*) menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman Muslim terhadap ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, Dan untuk dimensi pengalaman atau penghayatan (*experiential*) menunjuk pada seberapa jauh tingkat Muslim dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman religius (Fauzan & Tyasari, 2012).

2.2.7.2. Indikator Religiusitas

Asumsi mengenai sulitnya pengukuran religiusitas mulai berkurang karena berkembangnya pengukuran religiusitas di bidang ilmu psikologi, theologi dan sosiologi. Pengukuran religiusitas menurut (Glock dan Stark, 1965) dalam (Rahmawati, 2010) dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Religious Practice (Dimensi Peribadatan)

Menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatan – kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh agamanya.

Dalam keberislaman, aspek ini menyangkut pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al – Qur’an, doa, zikir ibadah kurban, iktikaf di masjid di bulan puasa, dan sebagainya.

2. *Religious Belief* (Dimensi Keyakinan)

Menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan Muslim dalam mengerjakan kegiatan – kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh agamanya. Di dalam keberislaman, isi aspek keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rosul, kitab – kitab Allah. Surga dan neraka, seta qadha dan qadar.

3. *Religious Knowledge* (Dimensi Pengetahuan)

Seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Hal ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam agamanya, sebagaimana yang termuat dalam kitab suci Al – Qur’an. Dalam keberislaman menyangkut pengetahuan tentang isi atau kandungan Al – Qur’an, pokok – pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan (rukun Islam, dan rukun iman), hukum Islam, sejarah Islam, dan sebagainya

4. *Religious Feeling (The Experiential Dimension)*

Menunjuk pada seberapa jauh Muslim dalam merasakan dan mengalami perasaan – perasaan dan pengalaman – pengalaman religius. Dalam keberislaman, aspek ini terwujud dalam perasaan dekat dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya dikabulkan Tuhan, perasaan khusyuk dalam beribadah, perasaan bersyukur kepada Allah, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah.

5. *Religious Effect (The Consequentialdimension)*

Dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dalam keber-Islaman, aspek ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, menyahterakan, dan menumbuh kembangkan orang lain, menegakkan keadilan, dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melakukan kecurangan, dan mematuhi norma – norma Islam, dan sebagainya

2.3. **Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan pembuatan penelitian:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Wilopo (2006)	Analisis faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen	Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi Kesesuaian kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
2	Wilopo (2008)	Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor BPK	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Pengendalian Internal dan Perilaku tidak Etis	Pengendalian internal dan perilaku tidak etis berpengaruh tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi
3	Thoyibatun (2012)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan & Perilaku Tidak Etis Variabel X : Kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi	Ketaatan terhadap aturan dan perilaku tidak etis merupakan faktor yang berpengaruh positif. Kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4.	Anik Fatun Najahningrum (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, dan prosedural, komitmen organisasi, asimetri informasi dan budaya etis organisasi.	Pengaruh negatif antara penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (<i>fraud</i>), Terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (<i>fraud</i>), Tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi dengan kecurangan (<i>fraud</i>).

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
5.	Ayu Rahmanti dan Nurlita Novianti (2016)	Pengaruh Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo)	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi, Gaya Kepemimpinan	Penegakan hukum dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan efektivitas pengendalian internal, keadilan organisasi, dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.
6.	Siti Nurlaeliyah dan Indah Anisykurlillah (2017)	<i>Analysis of Factors Affecting The Tendency of Accounting Fraud with An Ethical Behavior As Intervening Variable</i>	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi Variabel Y : Perilaku tidak etis	Keefektifan pengendalian internal dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi tidak berpengaruh. Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi berpengaruh terhadap perilaku tidak etis, ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh. Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis, sedangkan ketaatan aturan

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				akuntansi tidak berpengaruh.
7.	Ida Ayu Alit Oktaviani, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawi krama Tungga Atmadja (2017)	Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng.	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Akuntabilitas, Conflict of Interest, Penegakan Hukum.	Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi fraud. <i>Conflict of interest</i> , dan Penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi fraud.
8.	Devia Prapnalina Chandra dan Sukardi Ikhsan (2015)	Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Se-Kabupaten Grobogan	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Peraturan, Asimetri Informasi, Budaya Etis dan Komitmen Organisasi.	Terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). Tidak terdapat pengaruh antara budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud).
9.	Novita Puspasari dan Eko Suwardi (2016)	The Effect of Individual Morality and Internal Control on the Propensity to Commit Fraud: Evidence from	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Moralitas Individu dan	Pengendalian Internal dan Moralitas Individu saling berhubungan. Pengendalian internal terbukti mencegah Individu dengan moral yang rendah untuk melakukan kecurangan akuntansi

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
		Local Governments)	Pengendalian Internal	
10.	Aminah dan Chindy Yolanda Faramitha (2016)	Hubungan Pengendalian Intern dan Kompensasi dengan Kecurangan Akuntansi (Studi pada BPR di Provinsi Lampung)	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi	Pengendalian internal, Kompensasi, berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi.
11.	Figna Frilia (2015)	Pengaruh Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Asimetri Informasi, Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi	Asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
12.	Kusumastuti, (2012)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Keefektifan pengendalian internal, Kesesuaian kompensasi, Ketaatan aturan akuntansi, Asimetri informasi,	Kefektifan pengendalian internal, Kepuasan kompensasi dan moralitas manajemen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis. Kefektifan pengendalian internal, kepuasan kompensasi dan moralitas manajemen tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi,

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
			Moralitas manajemen Variabel Y : Perilaku tidak etis	asimetri informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku tidak etis, asimetri informasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi,
13.	Dian Mustika dan Sri Hastuti (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. Lampung	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Asimetri Informasi, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi	Asimetri informasi, Keefektifan pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
14.	Shinta Maharani (2013)	Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pada Entitas Publik di Indonesia	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Etika Bisnis Islam	Etika Bisnis Islam berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
15.	Imang Dapit Pamungkas (2014)	Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.	Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Variabel X : Religiusitas, Rasionalisasi	Religiusitas berpengaruh negatif terhadap rasionalisasi dapat diterima. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil
				<p>Kecurangan Akuntansi dapat diterima.</p> <p>Religiusitas berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi melalui Rasionalisasi tidak dapat diterima</p>
16	Nur Aisyah Ika dan Andraeny Dita (2017)	Analisis Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Etis, dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan	<p>Variabel Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi</p> <p>Variabel X : Pengendalian Internal, Budaya Etis, dan Religiusitas</p>	<p>Terdapat pengaruh pada keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan</p> <p>Tidak terdapat pengaruh pada variabel budaya etis dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan</p>

Sumber: Rangkuman penulis, 2018

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis mencoba menguji kembali beberapa variabel yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu variabel kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi. Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel yang jarang diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, antara lain *conflict of interest*, etika bisnis Islam, dan religiusitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian, kombinasi variabel, dan metode analisis data. Jika penelitian terdahulu didominasi dilakukan di Pemerintahan Daerah serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maka penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Pemilihan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai tempat penelitian didasarkan pada alasan bahwa kasus

kecurangan akuntansi pada Koperasi baik non syariah dan syariah khususnya di Kota Semarang masih tinggi. Kombinasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang secara logika dan berdasarkan teori diduga berpengaruh terhadap variabel sentral serta variabel yang tidak konsisten berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (*Fraud*). Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, *conflict of interest*, pengendalian internal, asimetri informasi, etika bisnis Islam dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan replikasi dari kompilasi antara penelitian Wilopo (2006); Kusumastuti & Meiranto (2012); Thoyibatun (2012) dengan melanjutkan penelitian mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan asimetri informasi terhadap *fraud*.

Berdasarkan penelitian (Wilopo, 2006), menemukan bahwa *fraud* perlu dikaji tidak hanya melalui pendekatan ilmu akuntansi, tetapi juga perlu mengikut sertakan pendekatan serta teori dari disiplin ilmu lain, oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan teori-teori baru seperti Teori Al-Wala' untuk mengkaji penelitian mengenai kecurangan akuntansi, dan menambahkan variabel lain seperti *conflict of interest*, etika bisnis Islam dan religiusitas yang masih jarang diteliti. Sedangkan untuk variabel *conflict of interest* mengacu pada penelitian (Oktaviani

et al., 2017). Kemudian etika bisnis Islam peneliti mengacu pada penelitian Maharani (2013) dan variabel religiusitas mengacu pada penelitian (Pamungkas, 2014).

2.4.1. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kesesuaian kompensasi sangat berpengaruh terhadap perilaku pegawai atau karyawan, biasanya seseorang akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan (Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*).

Hal ini sesuai dengan teori *fraud triangle*, bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor tekanan finansial berupa kurangnya kepuasan kompensasi pegawai dalam bekerja yang kemudian mempengaruhi seseorang melakukan tindakan tidak etis. Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu instansi untuk mencapai tujuan dan menjaga pegawai dengan baik, sebaliknya tanpa kompensasi yang sesuai dan adil pegawai yang ada akan sangat mungkin untuk meninggalkan instansi. Menurut Rivai (2004) dalam (Amalia, 2015) akibat dari ketidakpuasan pembayaran yang di rasa kurang dan tidak adil akan mengurangi kinerja, mogok kerja dan mengarah kepada tindakan-tindakan fisik dan psikologis seperti meningkatkan derajat ketidakhadiran dan kecurangan.

Ketika koperasi memberikan kompensasi yang sesuai, pegawai atau pengurus akan merasa disajahterakan oleh koperasi dan membuat pengurus memberikan kinerja terbaik untuk mencapai tujuan koperasi. Lain halnya jika koperasi tidak memperhatikan kesejahteraan pengurus dengan memberikan kompensasi yang tidak sesuai dengan jasa dan pekerjaan yang telah diberikan pengurus kepada instansi. Asumsinya adalah semakin sesuai kompensasi pegawai maka akan mampu menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Rahmantari & Novianti (2016); Frilia (2015); dan Thoyibatun (2012) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin sesuai kompensasi dan tinggi tingkat kepuasan pegawai akan kompensasi yang diterimanya, maka kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan akan berkurang. Oleh latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu sebagai berikut:

H₁: Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.4.2. Pengaruh *Conflict of Interest* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Konflik menyebabkan orang lebih mementingkan departemennya sendiri dibandingkan dengan organisasinya secara keseluruhan. Situasi tersebut akan menimbulkan sulitnya mencapai keselarasan tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Arfan dan Ishak (2005) dalam (Septiningrum, 2017) jika hal tersebut tidak

mungkin dicapai akan menyebabkan suatu kebencian terhadap manajemen dan anggaran.

Menurut Oktaviani et al. (2017) konflik kepentingan dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan, serta menimbulkan perbedaan pendapat, konflik kepentingan terjadi oleh adanya berbagai kepentingan dari tiap individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam upaya memperoleh otoritas atau kekuasaan yang saling bersinggungan.

Hal ini menjadi salah satu bentuk *pressure* atau tekanan dalam teori *fraud triangle*, ketika terjadi benturan kepentingan antara tiap individu dalam organisasi atau instansi, akan menyebabkan keduanya dalam keselarasan yang tidak sempurna karena keduanya berusaha untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. Tekanan untuk selalu berusaha memaksimalkan kepentingan atau utilitasnya sendiri ini menyebabkan seseorang condong untuk melakukan segala macam cara demi mencapai kepentingan pribadinya meskipun bertentangan dengan kepentingan perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mencapai keselarasan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Septiningrum (2017) memberikan hasil bahwa konflik kepentingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Sedangkan pada penelitian Oktaviani et al. (2017) membuktikan bahwa konflik kepentingan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap potensi *fraud*. Artinya jika dalam organisasi terdapat konflik kepentingan,

situasi tersebut akan menimbulkan sulitnya mencapai keselarasan tujuan organisasi dan menyebabkan suatu kebencian. Jika konflik kepentingan dapat dihindari oleh karyawan atau pejabat yang memiliki kekuasaan lebih maka potensi atau kecenderungan kecurangan akuntansi dapat di minimalisir. Berdasarkan analisis tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Conflict of Interest* berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.4.3. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu: reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasional, dan ketaatan pada hukum dan aturan (Arens et al., 2015:340). Jika pengendalian internal suatu perusahaan atau instansi sudah dijalankan secara efektif dan efisien, hal tersebut akan berdampak pada perilaku orang-orang di dalamnya yang menjalankan sistem pengendalian internal itu sendiri.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif akan meminimalisir terjadinya peluang tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan pengendalian intern yang tidak efektif akan memberikan peluang dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan perusahaan dan mengganggu keberlangsungan perusahaan, yang akan berakibat tujuan dari perusahaan tidak tercapai.

Pernyataan tersebut menjadi bukti adanya keterkaitan dengan teori *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* memaparkan tiga faktor yang menyebabkan dan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), dan *Razionalisation* (Rasionalisasi), faktor yang sangat mendukung terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan). Kecurangan akuntansi umumnya dilakukan karena adanya kesempatan dan peluang yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal dalam perusahaan. Sistem pengendalian intern yang lemah, membuat seseorang tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, karena tindakan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh siapapun.

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006); Chandra & Ikhsan (2015); Puspasari & Suwardi (2016); Aminah & Faramitha (2016) serta Thoyibatun (2012), keefektifan pengendalian internal dapat mencegah dan mengurangi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi di dalam manajemen yang berarti bahwa semakin efektif pengendalian internal dalam manajemen maka semakin rendah tindakan kecurangan akuntansinya. Atas dasar latar belakang diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.4.4. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Teori keagenan merupakan teori yang sering digunakan untuk menjelaskan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Teori keagenan bermaksud untuk

memecahkan dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah masalah yang muncul bila keinginan atau tujuan dari *prinsipal* dan *agent* bertentangan atau berbeda, dan juga disaat *prinsipal* merasa kesulitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*. Bila *agent* dan *prinsipal* berupaya memaksimalkan keuntungannya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka *agent* tidak selalu bertindak sesuai keinginan *prinsipal*. Keinginan, motivasi dan keuntungan yang tidak sama antara *agent* dan *prinsipal* menimbulkan kemungkinan *agent* bertindak merugikan *prinsipal*. Hal ini berkaitan dengan asimetri informasi antara *agent* dan *prinsipal*.

Wilopo (2006) bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain. Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi ini akan dimanfaatkan manajemen perusahaan dengan membuat atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen. Manajemen memanfaatkan asimetri informasi ini dengan tidak menyampaikan informasi-informasi penting atau ditampilkan secara sesat untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan. Ditinjau dari perspektif keagenan, asimetri informasi ini memotivasi manajemen (*agent*) untuk memberikan informasi yang menyesatkan tentang kapabilitas produktivitas dan kecurangan mereka.

Penelitian Chandra & Ikhsan (2015); Frilia (2015); Wilopo (2006) menunjukkan bahwa asimetri informasi mempunyai arah pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya apabila asimetri informasi semakin

meningkat, bisa meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.4.5. Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Chandra & Ikhsan (2015) etika organisasi merupakan pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan. Menurut Rae & Subramaniam (2008) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima. Sesuai dengan teori Al-Wala bahwa seseorang yang berada dalam lingkungan etika bisnis yang Islami, kan lebih mementingkan kepentingan bersama dan memiliki tanggungjawab kepada Allah SWT, entitas dan *stakeholder*.

Etika bisa menjadi tolok ukur pegawai atau pengurus dalam melakukan tindakan, karena seseorang akan lebih sering mengikuti tindakan atau perilaku disekitar lingkungan mereka bekerja, kemudian seseorang tersebut akan merasa yang dilakukan adalah benar karena lingkungan pekerjaannya atau sebagian besar rekan kerjanya juga melakukan tindakan atau perilaku yang sama, baik perilaku yang positif maupun negatif. Sesuai dengan teori *fraud triangle*, ketika rasionalisasi

individu memandang bahwa etika bisnis Islam adalah perilaku yang umum dilakukan dan dapat diterima oleh lingkungannya, dan semakin besar kontrol yang dirasakan terhadap akibat beretika bisnis Islam maka seseorang tersebut akan cenderung melakukan perilaku yang etis dan sesuai syariat Islam yang kemudian akan menghindari kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi.

Dalam penelitian Maharani (2013) mengungkapkan bahwa etika bisnis Islam berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat etika bisnis Islam maka akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya semakin menurun etika bisnis maka akan meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan.

H₅: Etika Bisnis Islam berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

2.4.6. Pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Salah satu fungsi religiusitas, yaitu untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat juga mendukung pendapat bahwa religiusitas dapat mengontrol perilaku seseorang untuk tidak melakukan kecurangan. Saat tingkat religiusitas seseorang itu tinggi, seseorang akan lebih mementingkan kepentingan bersama dan condong melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab demi mencapai tujuan pekerjaan yang selamat. Hal ini sesuai dengan teori *fraud triangle*, dimana saat seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka perilakunya akan mengikuti ajaran dari keyakinan yang diyakininya atau norma agama yang

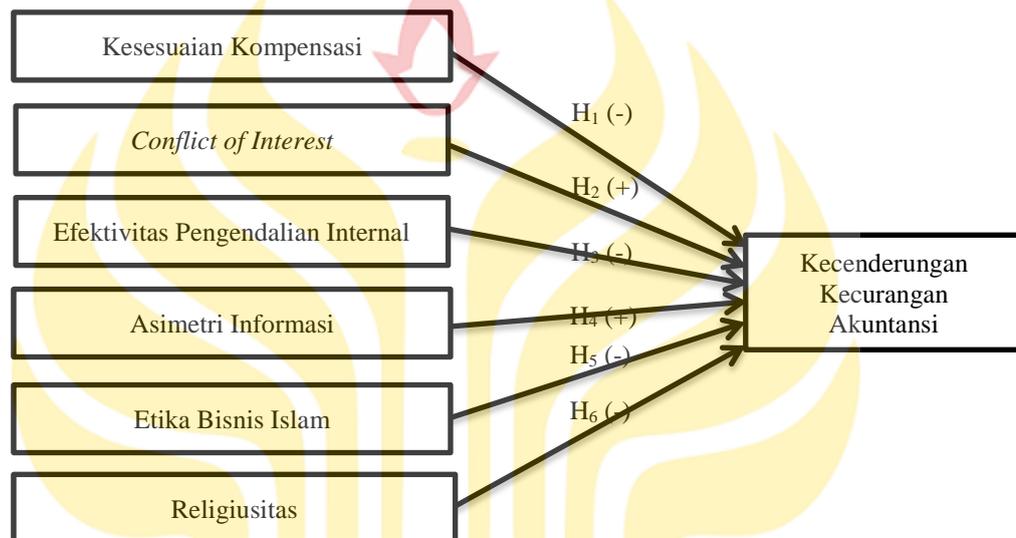
dianutnya. ketika berperilaku religius diterima oleh lingkungan sosial serta besar kontrol yang dirasakan akibat dari berperilaku dengan religius tersebut, maka diprediksi kuat niat seseorang untuk menghindari tindakan tercela seperti kecurangan akuntansi, lain halnya jika seseorang memiliki moral dan religiusitas yang rendah, seseorang tersebut akan cenderung merasionalisasikan bahwa tindakan kecurangan adalah wajar.

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal guna mendukung keberlangsungan koperasi harus ditunjang oleh tingkat moral dan etika pegawai. Moral dan etika pegawai dapat tercermin pada tingkat religiusitas dari pegawai. Pengaruh religiusitas terhadap kecurangan akuntansi sebelumnya didukung oleh penelitian Pamungkas (2014) yang membuktikan bahwa variabel religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila seseorang yang memiliki religiusitas tinggi maka senantiasa akan memperhatikan kepentingan umum, tidak mementingkan diri sendiri, dan peluang melakukan kecurangan semakin kecil. Hal ini juga didukung dengan teori Ak-Wala', seseorang dengan religiusitas tinggi akan menghindari perbuatan yang dilarang Allah SWT demi tanggung jawabnya terhadap entitas, *shareholder*, dan Allah SWT.

Penelitian yang dilakukan oleh Grasmick et al. (1991) bahwa keyakinan yang kuat pada agama mengurangi sikap untuk melakukan kecurangan pajak. Selain itu studi lain mengenai religiusitas telah dilakukan oleh Basri (2015) menunjukkan bahwa religiusitas negatif terhadap kecurangan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₆: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disusun gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, *conflict of interest*, efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, etika bisnis Islam dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga keuangan koperasi syariah di Kota Semarang. Berdasarkan uji dan hasil pembahasan yang disajikan, maka dapat disimpulkan:

1. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Karena semakin tinggi kesesuaian kompensasi, kecenderungan kecurangan akuntansi masih tinggi pula. Jadi tingginya kesesuaian kompensasi tidak menjamin pegawai tidak melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. *Conflict of Interest* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konflik kepentingan atau *conflict of interest* dalam koperasi maka akan semakin tinggi pula kecenderungan pegawai dalam melakukan kecurangan akuntansi.
3. Efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Efektivitas pengendalian internal tidak efektif mengurangi kecurangan akuntansi. Terbukti di tingkat efektivitas pengendalian yang tinggi, kecenderungan kecurangan akuntansi pun masih

tinggi.

4. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat asimetri informasi dalam koperasi maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akuntansinya. Kesenjangan informasi oleh agent dan principal akan mempengaruhi kinerja yang kemudian berimbas pada potensi kecurangan-kecurangan termasuk kecurangan akuntansi.
5. Etika bisnis Islam berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa etika bisnis Islam yang tinggi bisa mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai. Etika bisnis Islam efektif mengurangi kecurangan akuntansi, karena kinerja pegawai akan diimbangi dengan pertanggungjawaban dan kejujuran untuk mendapatkan hasil kerja yang selamat dan sesuai syariat Islam.
6. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai. Pegawai dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan menghindari tindakan-tindakan tidak terpuji seperti kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan di bab sebelumnya, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi koperasi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memprediksi kemungkinan kecurangan akuntansi oleh pegawai, sehingga dapat dilakukan pembinaan lebih awal untuk menghindari kecenderungan kecurangan akuntansi oleh pegawai. Terutama dalam seleksi penerimaan pegawai seharusnya dilakukan melalui proses *screening* yang jelas. Catatan dan *track record* pegawai di tempat kerja sebelumnya merupakan poin penting yang harus dimiliki unit *human capital* dalam penentuan seleksi penerimaan.
2. Bagi pengurus koperasi diharapkan dapat melakukan evaluasi kinerja dengan teratur, sehingga seluruh anggota koperasi dapat mengetahui bagaimana kinerja dari setiap bagian dalam koperasi dan pengendalian internal dalam koperasi dapat berjalan efektif.
3. Bagi penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel baru seperti GCG karena pada GCG terdapat indikator-indikator seperti *accountability*, *transparency*, dan *responsibility*, independensi, kewajaran dan spiritualitas karena koperasi-koperasi di Kota Semarang masih enggan menunjukkan kewajaran laporan keuangannya kepada publik.
4. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data hanya menggunakan metode dengan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pernyataan lisan yang baik. Bagi peneliti mendatang dapat menambahkan teknik pengumpulan data berupa wawancara atau pernyataan lisan kepada responden selain kuesioner.

5. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah dan target responden penelitian. Agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbesar jumlah responden dan memperbesar ruang lingkup penelitian agar penelitian kedepan memiliki cakupan yang lebih luas dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. C. T., & Mardiasmo. (2002). Analisis Pengaruh Strategi Institusi, Budaya Institusi, dan Conflict of Interest Terhadap Budgetary Slack. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 17(1), 105–113.
- Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–9. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Akkizidis, I., & Khandelwal, S. K. (2008). *Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance*. Hampshire: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230598751>
- Amalia, R. D. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Aminah dan Faramitha, C. Y. (2016). Hubungan Pengendalian Intrn dan Kompensasi dengan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada BPR di Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 1–13.
- Amita, F. (2013). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Proses Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah di Kota Depok. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Anshar, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik di Indonesia.
- Ardiansah, M. N. (2009). Pengaruh Karakteristik Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit: Studi Empiris Koperasi Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(1), 6–13.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid 1* (15th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Argarini, E. P. (2015). Pengaruh Kompensasi Terhadap Fraud Dengan Kepuasan Kerja. *Jurnal Nominal*, 4(2), 127–135.
- Arifin, M. Z. (2016). KSP Karya Niaga Bermasalah, Pengurus Minta Tukimin Bertanggungjawab. Retrieved May 22, 2018, from <http://jateng.tribunnews.com/2016/08/01/ksp-karya-niaga-bermasalah-pengurus-minta-tukimin-bertanggungjawab>
- Arsinta, Y., & Widiyanto. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 7(1), 251–264.

- Ayuningtias, W. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pengurus KPRI di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Badroen, F. (2015). *Etika Bisnis dalam Islam (IV)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barnett, T., Bass, K., & Brown, G. (1996). Ethical Ideology , a to Report Peer ' s Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 15(11), 1161–1174.
- Barro, R. J., & McCleary, R. M. (2014). Religion and Economic Growth. *National Bureau of Economic Research*, (1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, VIII(1), 61–77.
- Beekun, R. I. (2004). *Islamic Business Athics*. Jakarta: Pent. Muhammad, Pustaka Pelajar.
- Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and fraudulent financial reporting: Applying the theory of planned behavior. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 115–129. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-7370-9>
- Chandra, A. A. (2016). Dua Bos Perusahaan Investasi Bodong CSI Ditangkap Polisi. Retrieved May 22, 2018, from <https://finance.detik.com/moneter/d-3361239/dua-bos-perusahaan-investasi-bodong-csi-ditangkap-polisi>
- Chandra, D. P. (Universitas N. S., & Ikhsan, S. (Universitas N. S. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah se-Kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Coso, T. C. of S. O. of the T. C. (2013). Internal control - integrated framework: executive summary. In *New York* (pp. 1–20). <https://doi.org/978-1-93735-239-4>
- Cressey. (1953). *Others People's Money: a Study in The Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: FreePress.
- Darmawati. (2012). Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *FENOMENA*, 4(2), 127–137.
- Delfi, T. (2014). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Survey Pada Perusahaan BUMN Cabang Pekanbaru). *Jom FEKON*, 1(2), 1–17.
- Deny, S. (2018). Koperasi Simpan Pinjam Masih Enggan Laporkan Transaksi Keuangan. Retrieved May 22, 2018, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3228194/koperasi-simpan-pinjam-masih-enggan-laporkan-transaksi-keuangan>

- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Dyrenge, S. D., Mayew, W. J., & Williams, C. D. (2012). Religious Social Norms and Corporate Financial Reporting. *Journal of Business Finance and Accounting*, 39(7–8), 845–875. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2012.02295.x>
- Faisal, M. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 67–73. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Faraby, M. E., & Faiza, S. I. (2014). Etos Kerja Pedagang Etnis Madura di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. *JESTT*, 1(3), 178–193.
- Faradila, A. (2018). *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Mediasi*. Universitas Negeri Semarang.
- Fauwzi, M. G. H. (2011). *Analisa Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Fauzan. (2014). Hubungan Religiusitas dan Kewirausahaan. *Modernisasi*, 10(2), 147–157.
- Fauzan, & Tyasari, I. (2012). Pengaruh Religiusitas Dan Etika Kerja Islami Terhadap Motivasi Kerja. *Jurnal Modernisasi*, 8(3), 206–232. <https://doi.org/10.21067/jem.v8i3.787>
- Frilia, F. (2015). Pengaruh Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi empiris pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(1), 1–15.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Dilengkapi Software Smartpls 3.0. Xlstat 2014 dan WarpPLS 4.0* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2nd ed.).
- Gibson, Ivancevich, J. M., & Donnely. (1997). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Grasmick, H. G., Kinsey, K., & Cochran, J. K. (1991). Research Note Denomination , Religiosity and Compliance with the Law : A Study of Adults.

- Journal for Scientific Study of Religion*, 30(1), 99–107. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1387152> .
- Gutomo, A. (2018). Di Jateng Diusulkan Izin KSP Dibatasi Dialihkan Ke KUD dan Koperasi Sektor Rill. Retrieved May 22, 2018, from <https://pipnews.co.id/daerah/di-jateng-diusulkan-izin-ksp-dibatasi-dialihkan-ke-kud-dan-koperasi-sektor-rill/>
- Hakim, M. A. (2013). Persepsi pelaku bisnis SPBU di Kabupaten Kudus terhadap etika bisnis Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–18. Retrieved from <http://e-journal.stainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/65>
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Ika, N. A., & Dita, A. (2017). *Analisis Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Etis, dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan*. IAIN Surakarta.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iswati, D., Nindito, M., & Zakaria, A. (2017). The Effect of Internal Financial Indicators on the Tendency of Accounting Fraud (A Case of Companies Listed in Indonesia Stock Exchange). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 123–131.
- Jayanto, P. Y. (2016). *Introduction: Sharia Economic*. Semarang: Cerdas Bersama.
- Khairani, H. (2015). *Etika Bisnis Islam tentang Manajemen Laba*. UIN Syarif Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah.
- Khodijah, S. (2018). *Analisis Konsep COSO dan Filosofi Khalifatullah Fil Ardh Dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraud*. Universitas Islam Indonesia.
- Koesmana, D. S., Kristiawan, H., & Rizki, A. (2007). Peran Auditor Internal Dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud Menurut Standart Profesi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 11–13.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen* (6th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumantoro, Nurkhin, A., & Mukhibad, H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT ANDA Salatiga). In *Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 5 November 2016* (pp. 39–51).
- Kusumastuti, N. R. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro.

- Kusumastuti, N. R., & Meiranto, W. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1–15. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting%0AANALISIS>
- Lasta, H. A. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(2), 1–10.
- Leng, J., & Ding, Y. (2011). Internal Control Disclosure and Corporate Governance: Empirical Research from Chinese Listed Companies. *Technology and Investment*, 02(04), 286–294. <https://doi.org/10.4236/ti.2011.24029>
- Lestari, V. I. (2017). *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention Pada Pt. Bni Syariah Cabang Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Lubis, A. I. (2005). *Akuntansi Keprilakuan* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Maharani, S. (2013). Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan Entitas Publik di Indonesia. *Ijtihad*, 7(2), 203–218.
- McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and Economy. *Journal of Economic Perspectives*, 20(2), 49–72. <https://doi.org/10.1257/jep.20.2.49>
- Montgomery, D., M Beasley, S., Menelaides, & Palmrose, Z. (2002). Auditors' New Procedures for Detecting Fraud. *Journal of Accountancy*, 63–66.
- Mukhibad, H. (2014). Dampak Pendidikan Etika Bisnis dan Pendidikan Ekonomi Syariah Terhadap Etika Bisnis. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(2), 119–132.
- Mustika, D., Hastuti, S., & Heriningsih, S. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung Full Paper. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–22.
- Mustika, D., Hastuti, S., & Heriningsih, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–22. Retrieved from [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/006.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/006.pdf)
- Najahningrum, A. F. (2013a). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267.
- Najahningrum, A. F. (2013b). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Universitas

Negeri Semarang.

- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi (FE)*, 9(1), 50–58.
- Nugroho, A. (2017). *Peran Mediasi Keefektifan Pengendalian Internal Dalam Determinan Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada KPRI*. Universitas Negeri Semarang.
- Nurlaeliyah, S., & Anisykurlillah, I. (2017). Analysis of Factors Affecting The Tendency of Accounting Fraud with An Ethical Behavior As Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, 6(2), 299–312.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas , Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Pamungkas, I. D. (2014). Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 48–59.
- Prajanto, A., & Pratiwi, R. D. (2016). The Impact of Corporate Cultures And Financial Ratios On The Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 8(1), 39–52.
- Purnomo, Y. D., & Khafid, M. (2017). Analysis of Factors Affecting The Tendency of Accounting Fraud with The Mediation of Ethical Behavior. *Accounting Analysis Journal*, 6(2), 229–241.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The Effect of Individual Morality and Internal Control on the Propensity To Commit Fraud : *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 208–219.
- Puspitasari, C., & Jayanto, P. Y. (2017). The Influence of Selling Price Pricing, Margin Level, Product Quality, Shariah Marketing, Collateral, Product Knowledge and Risk on Member's Interest in Using Murabahah Financing. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 229–237.
- Puspitasari, M. (2014). ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, PERMODALAN DAN MANAJEMEN DI KSPS BMT LOGAM MULIA, 7(1), 85–110.
- Qardhawi, Y. (2004). *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud. *Managerial Auditing Journal*, 23(2), 104–124. <https://doi.org/10.1108/02686900810839820>

- Rahmantari, A., & Novianti, N. (2016). Pengaruh Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Rahmawati, D. (2010). *Perbedaan Tingkat Religiusitas pada Mahasiswa Fakultas Keagamaan dan Non Keagamaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Reskino, & Anshori, M. F. (2016). Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangel. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 7(2), 256–269.
- Rezaee, Z. (2004). Restoring public trust in the accounting profession by developing anti-fraud education, programs, and auditing. *Managerial Auditing Journal*, 19(1), 134–148. <https://doi.org/10.1108/02686900410509857>
- Riahi-Belkaoui, A., & Picur, R. D. (2000). Understanding fraud in the accounting environment. *Managerial Finance*, 26(11), 33–41. <https://doi.org/10.1108/03074350010766972>
- Rivai, V. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). *Islamic Economic and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam. Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi, A. A. (2015). Model Pembelajaran Pendidikan Islam Emansipatoris. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 1(2), 117–127.
- Sampurno, W. M. (2016). Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(1), 13–18.
- Saputro, E. P. (2017). Koperasi Mati Suri di Era Otonomi Daerah. Retrieved May 22, 2018, from <https://economy.okezone.com/read/2017/07/12/320/1734352/koperasi-mati-suri-di-era-otonomi-daerah>
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2015). *Structural Equation Modeling (SEM) Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Senjaya, I. C. (2016). Ketua Koperasi Inti Artha Tersangka Kasus Korupsi CSR PTPN IX. Retrieved May 22, 2018, from <https://jateng.antarane.ws.com/detail/ketua-koperasi-inti-aritha-tersangka-kasus-korupsi-csr-ptpn-ix.html>

- Septiningrum. (2016). *Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Konflik Kepentingan Terhadap Kesenjangan Anggaran dalam Penyusunan Anggaran Partisipatif*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Septiningrum. (2017). The Effect of Student's Perception of Conflict of Interest to Budgetary Slack in Partisipative Budgeting. *Jurnal Profita*, 4, 1–11.
- Seputra, Y. E. A. (2014). *Manajemen dan Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, 4(2), 111–126.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Pt. Alfabeta.
- Sukirman, & Sari, M. P. (2013). Model deteksi kecurangan berbasis Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 199–225.
- Sulistiyowati, E. (2014). *Analisis Pengaruh Etika Kerja Islam Dan Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organisasi (Studi Kasus pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Taruna Sejahtera)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Sulistyo, H. (2014). Relevansi Nilai Religius Dalam Mencegah Perilaku Disfungsional Audit. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, (36), 1–13.
- Thoyibatun, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 16(2), 245–260.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Audit Kontemporer* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). The Effects of Moral and Self-Monitoring Intentions to Report on Financial Statements Reasoning on CFO Fraudulently. *Journal of Business Ethics*, 40(1), 15–32.
- Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(1), 99–126. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.726>
- Wahyuni, I. N., Hakim, L., & Murtini, W. (2018). Effectiveness of Education Module Implementation on Increasing Islamic Financial Literacy and Halal Literacy of MSMEs Perpetrators. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 51–58.
- Wilopo, R. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX Padang*, 23–26.

- Wilopo, R. (2008). Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Perilaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan: Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*. Retrieved from <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav>
- Wirawan. (2013). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yudiana, Y., Hafidhuddin, D., & Ismal, R. (2018). Pengukuran Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 179–190. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.179>
- Zainudin, E. F., & Hashim, H. A. (2016). Detecting fraudulent financial reporting using financial ratio. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(2), 266–278. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2015-0053>
- Zimbelman, M. F. (2014). *Forensic Accounting, 4th Edition*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Zuraya, N. (2016). Koperasi Syariah Dinilai Semakin Prospektif. Retrieved May 22, 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/01/28/01nhk0383-koperasi-syariah-dinilai-semakin-prospektif>